



RENCANA STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2021-2026



Jalan Batu Sisir - Bukit Arai
Gedung E (Pulau Semiun) Lantai II - Ranai Kecamatan Bunguran Timur 29711
KABUPATEN NATUNA



PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026. Renstra ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 yang mengakomodir program dan kegiatan untuk mendukung program kegiatan Pemerintah pusat. Renstra ini akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Natuna.

Kepala Dinas



SRI HARININGSIH, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700124 199703 2 004





DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Ii
DAFTAR GAMBAR	Iv
DAFTAR GRAFIK	V
DAFTAR TABEL	Vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	7
2.1.2. Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna	19
2.2.1. Sumber Daya Manusia	19
2.2.2. Sarana dan Prasarana	20
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	23
2.3.1. Bidang Ketahanan Pangan	23
2.3.2. Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna	92
2.4.1. Tantangan	92
2.4.2. Peluang	93
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	94
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	96
3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI	98
3.4. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026...	102
3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna	108
3.6. Isu Strategis Kabupaten Natuna	114
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	117
4.1. Tujuan dan Sasaran	117



BAB V	:	STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	120
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	123
BAB VII	:	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	134
BAB VIII	:	PENUTUP.....	136

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	II.1	Struktur Organisasi	11
---------------	-------------	----------------------------------	-----------



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	II.1	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun) Kabupaten Natuna, Tahun 2016-2020	24
	II.2	Perkembangan Rata-Rata Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020	25
	II.3	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun) Kabupaten Natuna, Tahun 2015-2019	26
	II.4	Perkembangan Rata-Rata Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Natuna Tahun 2015-2019	28
	II.5	Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan Protein serta Skor PPH tahun 2017-2019	76
	II.6	Perkembangan Konsumsi Pangan Energi tahun 2016 – 2018 ..	76



DAFTAR TABEL

TABEL	II.1	Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2022.....	19
	II.2	Jumlah PNS/CPNS/PTT Tahun 2022.....	20
	II.3	Daftar Sarana dan Prasarana.....	20
	II.4	Jumlah Kendaraan Dinas	22
	II.5	Jumlah Alat dan Mesin Dinas.....	22
	II.6	Jumlah Peralatan Kantor.....	22
	II.7	Capaian Urusan Pangan Tahun 2016-2020.....	24
	II.8	Perkembangan Rata-rata Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020.....	25
	II.9	Indikator Kinerja Ketersediaan Pangan Utama.....	26
	II.10	Perkembangan Rata-Rata Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020.....	27
	II.11	Data RTM Terbantu dan Terbina Tahun 2019	29
	II.12	Komposisi Ketersediaan Zat Gizi Kabupaten Natuna 2016-2020...	34
	II.13	Nilai PPH Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020.....	36
	II.14	Sistem Kewaspadaaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Natuna Tahun 2019.....	42
	II.15	Sistem Kewaspadaaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Natuna Tahun 2020.....	47
	II.16	Kondisi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Natuna Tahun 2019.....	54
	II.17	Kondisi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Natuna Tahun 2020.....	55
	II.18	Kondisi Kawasan Mandiri Pangan di Kabupaten Natuna Tahun 2019.....	57
	II.18	Kondisi Kawasan Mandiri Pangan di Kabupaten Natuna Tahun 2019.....	58
	II.19	Data Kelompok Lumbung Pangan Kabupaten Natuna.....	59
	II.20	Data Pengisian Lumbung Pangan Berstatus Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2017-2020.....	61
	II.21	Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017-2020.....	62
	II.22	Daftar Harga Rata-rata Komoditi Kabupaten Natuna Tahun 2017-2020.....	64
	II.23	Panel Harga Strategis HBKN (5 Hari Menjelang Puasa) Tahun 2017.....	66
	II.24	Panel Harga Strategis HBKN (10 Hari Menjelang Lebaran) Tahun 2017	67
	II.25	Panel Harga Strategis HBKN (5 Hari Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru) Tahun 2017.....	68
	II.26	Panel Harga Strategis HBKN (10 Hari Menjelang Lebaran) Tahun 2018.....	69
	II.27	Panel Harga Strategis HBKN (5 Hari Menjelang Idul Adha) Tahun 2018.....	70





	II.28	Panel Harga Strategis HBKN (5 Hari Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru) Tahun 2018.....	71
	II.29	Panel Harga Strategis HBKN (10 Hari Menjelang Lebaran) Tahun 2019.....	72
	II.30	Panel Harga Strategis HBKN (5 Hari Menjelang Idul Adha) Tahun 2019.....	73
	II.31	Panel Harga Strategis HBKN (5 Hari Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru) Tahun 2018.....	74
	II.32	Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2017-2020.....	75
	II.33	Data Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 2013-2019.....	78
	II.34	Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016-2020.....	80
	II.35	Luas Lahan Sawah Berdasarkan SID Sawah.....	82
	II.36	Areal dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016-2020.....	83
	II.37	Luas Areal dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016-2020.....	85
	II.38	Populasi Ternak Besar Tahun 2017-2021.....	86
	II.39	Populasi Ternak Kecil Tahun 2017-2021.....	87
	II.40	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Sumber Dana APBD Tahun 2016-2020.....	88
	II.41	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bidang Ketahanan Pangan Sumber Dana APBD Tahun 2016-2020.....	
	II.42	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Sumber Dana APBN Tahun 2017-2019.....	91
TABEL	III.1	Permasalahan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	95
	III.2	Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.....	114
	III.3	Keselarsan Antar Kebijakan RTRW dengan Misi RPJMD Kabupaten NATUNA.....	116
TABEL	IV.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026.....	118
	IV.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026..	119
TABEL	V.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Natuna Berdasarkan Misi dan Strategi Arah Kebijakan.....	121
	V.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2021 -2026.....	121
TABEL	VI.1	Keterkaitan Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026.....	123
	VI.2	Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 – 2026.....	125
TABEL	VII.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026.....	134





I.

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Pertanian Kabupaten Natuna merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis skala lokal, nasional, dan global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja. Sesuai dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan di Kabupaten Natuna untuk lima tahun mendatang. Selain itu, renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2021 – 2026 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan, pengawasan keamanan pangan sesuai dengan karakteristik daerah, penyediaan dan pengembangan sarana/prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan, pengendalian OPT tanaman, serta penyuluhan pertanian. Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan



pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi sebagai pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya genetik (SDG), penyediaan dan pengembangan sarana/prasarana pertanian, pengendalian penyakit hewan, pengendalian OPT tanaman, serta peningkatan kapasitas penyuluh dan kelembagaan penyuluhan. Dengan demikian, program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat dalam rangka mewujudkan dinamisasi gerak pembangunan sektor agraris dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif.

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna sebagai salah satu dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 tahun 2021, memiliki kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan, serta sejalan dengan fungsinya untuk melaksanakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi di bidang ketahanan pangan dan pertanian, bersama-sama instansi terkait lainnya dalam memantapkan ketahanan pangan.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah, maka urusan pangan menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.



Secara teknis, proses penyusunan rancangan renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran tentang Tata Cara Penyusunan Dan Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah. Dimana proses ini tidak terpisahkan dan dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Selain berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, secara substansi renstra ini mengacu arah kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna 2021 – 2026, Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021–2026 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, reliabel dan implementatif.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026
14. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 dan sebagai dasar bagi semua stakeholder dan seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna dalam melaksanakan program RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2021 - 2026



dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Sedangkan tujuan dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna ini adalah:

1. Mengetahui kinerja Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;
2. Memandu perencanaan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berkelanjutan;
3. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah setiap tahun;
5. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi OPD, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III Isu-Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2021 - 2026



Berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan OPD yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna 2016–2021.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan

Berisi Rencana dan Program Organisasi Perangkat Daerah

BAB VII Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup



II.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Ketahanan pangan dan pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian, dengan rincian sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
3. Merumuskan kebijakan perencanaan program dan anggaran;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;



5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum dan ketatausahaan;
6. Menetapkan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum dan ketatausahaan;
7. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup dinas;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Pertanian Kabupaten Natuna mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
3. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
4. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Natuna terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2021 - 2026



2. Sekretariat;

Terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Analis Anggaran Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan.

3. Bidang Ketahanan Pangan;

Terdiri dari beberapa JFT sebagai berikut :

1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Subkoordinator Ketersediaan, Kerawanan Dan Cadangan Pangan, Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan;
2. Ahli Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Distribusi Dan Harga Pangan;
3. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Keamanan Pangan

4. Bidang Perkebunan;

Terdiri dari beberapa JFT sebagai berikut :

1. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Muda Sub Koordinator Perbenihan Dan Perlindungan Perkebunan;
2. Penyuluh Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Produksi Perkebunan;
3. Penyuluh Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Pengolahan Dan Pemasaran Perkebunan.

5. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Terdiri dari beberapa JFT sebagai berikut :

1. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Muda Sub Koordinator Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
2. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Muda Sub Koordinator Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
3. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Muda Sub Koordinator Pengolahan Dan Pemasaran Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Terdiri dari beberapa JFT sebagai berikut :

1. Penyuluh Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Perbibitan Dan Produksi;
2. Penyuluh Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Kesehatan Hewan



3. Penyuluh Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Kesmavet, Pengolahan Dan Pemasaran.

7. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;

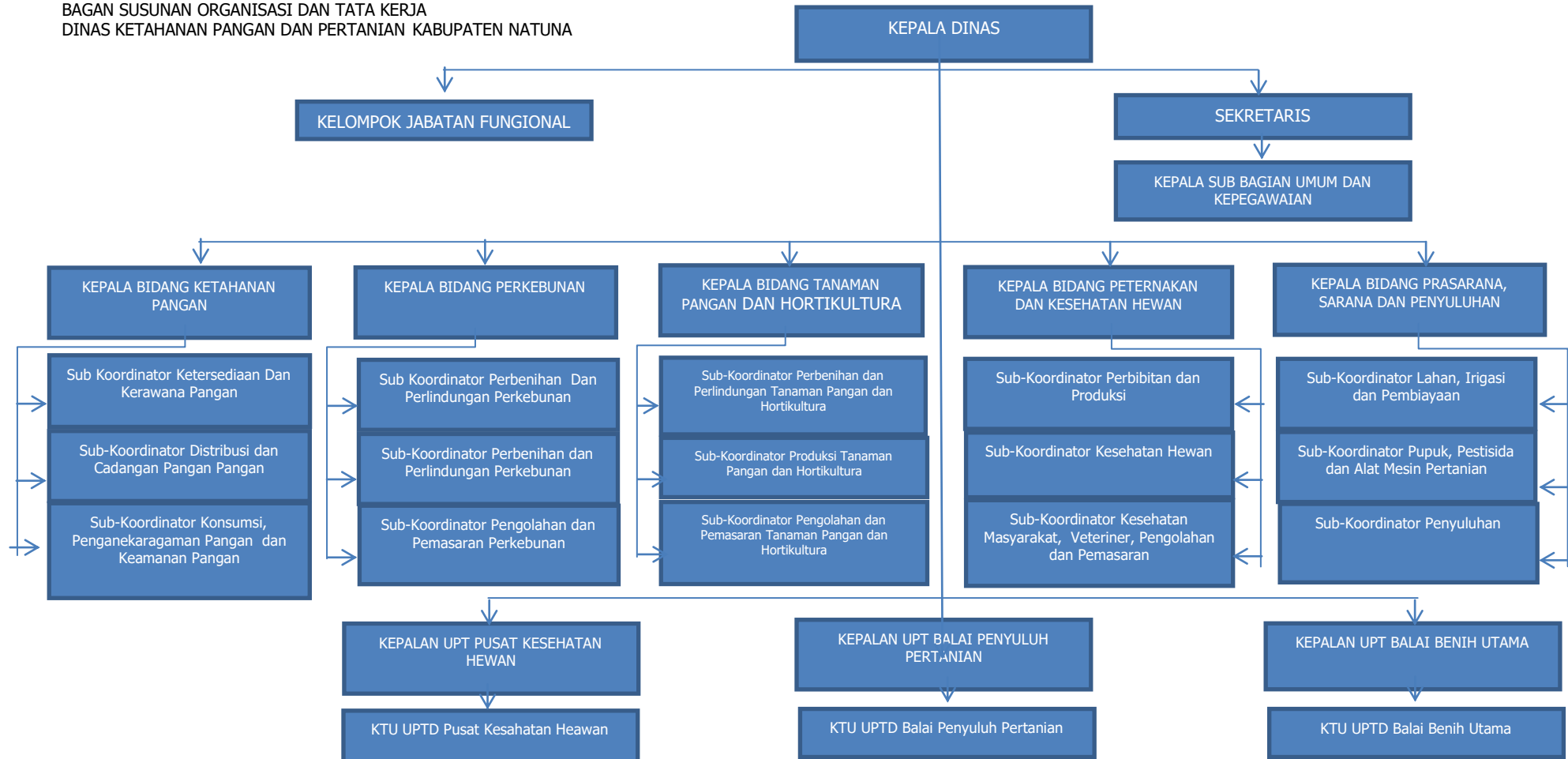
Terdiri dari beberapa JFT sebagai berikut :

1. Penyuluh Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Lahan, Irigasi Dan Pembiayaan;
2. Penyuluh Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Pupuk, Pestisida Dan Alsintan;
3. Penyuluh Pertanian Ahli Muda Sub Koordinator Penyuluhan.

8. Unit Pelaksana Teknis.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NATUNA





a. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Uraian Tugas Kepala Dinas meliputi :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi Kesekretariatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan dan anggaran di lingkup Dinas;
- d. Merumuskan dan menetapkan operasional kebijakan teknis di lingkup Dinas;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional kebijakan teknis di lingkup Dinas;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, umum, kepegawaian dan bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. Menilai kinerja bawahan di lingkup Dinas;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/ Bupati, baik lisan maupun tertulis.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- c. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
- d. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;



- e. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

b. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan, mengevaluasi, menyusun dan melaksanakan kegiatan di Sekretariat Dinas Ketahanan pangan dan pertanian;

Uraian Tugas Sekretariat meliputi :

- a. Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan dilingkup Sekretariat dan lingkup Dinas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dilingkup sekretariat sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- c. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventaris dan rumah tangga;
- d. Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
- e. Menyusun pelaporan Dinas;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- g. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- h. Mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja Dinas;
- i. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
- j. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;
- b. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;



- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan;
- 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- 3. Analis Anggaran Ahli Muda Sub Koordinator Keuangan.

c. BIDANG KETAHANAN PANGAN

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

Uraian tugas Bidang Ketahanan Pangan meliputi :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Ketahanan Pangan berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Kegiatan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- e) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kegiatan Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;



- f) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kegiatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Ketahanan Pangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Sub-Koordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Sub-Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan Pangan;
- c. Sub-Koordinator Konsumsi, Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan.

d. BIDANG PERKEBUNAN

Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Uraian tugas Bidang Perkebunan meliputi :

- a. menyusun rencana operasional rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan di lingkungan bidang Perkebunan berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. merencanakan kebijakan teknis Bidang Perkebunan sebagai pedoman kerja;
- e. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan tanaman perkebunan;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan;
- g. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis budidaya tanaman perkebunan;



- h. menyusun tugas-tugas lain yang diberikan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi;
- i. mengevaluasi rencana kerja, kebijakan, kajian, dan regulasi di Bidang Perkebunan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- j. mengoreksi, membina dan menilai hasil kinerja pegawai di Bidang Perkebunan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang perkebunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perkebunan terdiri dari:

- a. Sub-Koordinator Produksi Perkebunan;
- b. Sub-Koordinator Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- c. Sub-Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

e. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Uraian tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura



- sesuai dengan ketentuan dan perturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan dan perturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

- a. Sub-Koordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Sub-Koordinator Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Sub-Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura

f. BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

Uraian tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan meliputi :

- a. menyusun rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;



- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- f. pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub-Koordinator Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. Sub-Koordinator Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian;
- c. Sub-Koordinator Penyuluhan.

g. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Uraian tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;



- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Sub-Koordinator Perbibitan dan Produksi;
- b. Sub-Koordinator Kesehatan Hewan;
- c. Sub-Koordinator Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil di Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna adalah sebanyak 87 orang dengan status PNS sebanyak 69 orang dan tenaga PTT/THL 18 orang. Berikut tabel klasifikasi PNS/PTT/THL menurut pendidikan, pangkat dan golongan :

Tabel 2.2.1.1 Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2022

No.	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda / IV.c	0	1	1
2.	Pembina Tk. I/ IV.b	2	1	3
3.	Pembina / IV.a	3	1	4
4.	Penata Tk.I / III.d	7	11	18
5.	Penata / III.c	9	2	11
6.	Penata Muda Tk.I / III.b	2	2	4
6.	Penata Muda / III.a	4	6	10



7.	Pengatur Tk.I / II.d	8	5	13
8.	Pengatur / II.c	3	0	3
9.	Pengatur Muda Tk.I / II.b	1	0	1
10.	Pengatur Muda / II.a	0	1	1
Jumlah		39	30	69

Tabel 2.2.1.2 Jumlah PNS/CPNS Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Menurut Pendidikan Tahun 2022

No.	Status	SD	SMP	SMA	DIII	DIV	S1	S2	Jumlah
1.	PNS	-	-	21	4	4	33	7	69
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PTT	-	1	11	1	-	5	-	18
Jumlah		-	1	33	5	4	38	7	87

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Natuna didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.2.2.1 Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Natuna 2020 - 2021

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan gedung kantor	1 unit
2	Bangunan perumahan	2 unit
3	Bangunan gudang	2 unit
4	Bangunan ruang pertemuan	10 unit
5	Pos IB	2 unit
6	Pos Keswan	3 unit
7	Mobil dinas	2 buah



No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
8	Mobil operasional	2 buah
9	Kendaraan roda dua	45 buah
10	Meja kerja	63 buah
11	Kursi kerja	82 buah
12	Lemari arsip	15 buah
13	AC	14 buah
14	Meja computer	4 buah
15	Komputer	9 buah
16	Meja Rapat	1 buah
17	Printer	17 buah
18	Mesin tik	1 buah
19	Kursi Rapat	100 buah
20	Dispenser	5 buah
21	Jam dinding	5 buah
22	Filling Cabinet Besi	9 buah
23	Sapu	6 buah
24	Tempat sampah	8 buah
25	Handycam	5 Buah
26	Infokus	4 Unit
27	Camera	4 Unit
28	Pompa Air	5 Unit
29	Note Book	26 Unit

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember , 2021)



**Tabel. 2.2.2.2. Jumlah Kendaraan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Natuna Tahun 2021**

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah
1.	Roda Empat	Unit	5
2.	Roda Dua	Unit	33

**Tabel.2.2.2.3. Jumlah Alat dan Mesin Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan
Kabupaten Natuna s/d Tahun 2021**

No	Nama	Satuan	Unit
1	Handtraktor	Unit	4
2	Hydrotiler	Unit	5
3	Traktor	Unit	7
4	Transplanter	Unit	1
5	Pompa air	Unit	4
6	Mesin Kompos	Unit	4
7	Mesin perontok	Unit	1
8	Perangkat uji tanah kering (PUTK)	Unit	3
9	Perangkat uji tanah sawah (PUTS)	Unit	3

**Tabel 2.2.2.4 Jumlah Peralatan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Natuna Tahun 2021**

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Mesin Ketik Manual Standar	Unit	1
2	Filing Cabinet	Unit	14
3	Brankas	Unit	1
4	Meubelier	Unit	24
5	Lemari Penyimpanan	Unit	23



6	Handycam	Unit	7
7	Meja Rapat	Unit	2
8	Kursi Tamu	Unit	1
9	Alat Pendingin	Unit	13
10	Komputer	Unit	9
11	Note Book	Unit	23
12	Printer	Unit	36
13	Kamera	Unit	5
14	Proyektor	Unit	4
15	Meja kerja	Unit	63
16	Kursi Kerja	Unit	80
17	Kursi Rapat	Unit	125

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna memiliki peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan Pertanian di Kabupaten Natuna. Rencana Strategis Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Natuna serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari tingkat capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna dengan kinerja masing-masing program.

2.3.1. Bidang Ketahanan Pangan

Kinerja Bidang Ketahanan Pangan selama periode tahun 2016-2020 semakin membaik yang ditunjukkan dari Capaian Indikator urusan Pangan tabel dibawah ini :

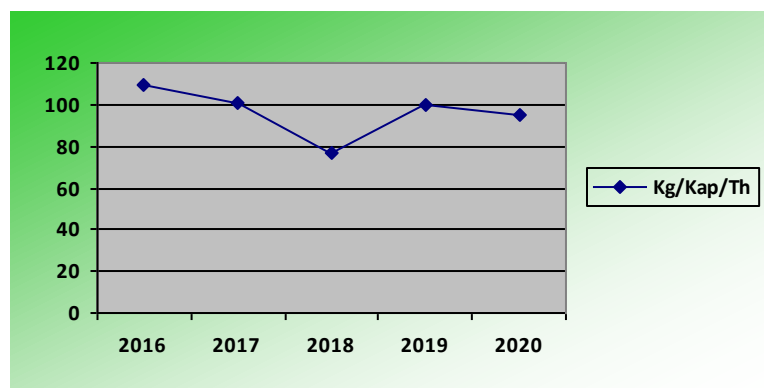


Tabel Capaian Urusan Pangan Kabupaten Natuna tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kap/Th	109,46	100,86	77,25	99,54	94,83
2	Regulasi Ketahanan Pangan	Regulasi	1	3	6	9	12
3	Nilai / Skor Pola Pangan (PPH) Konsumsi	Nilai/Skor	75,4	78,2	83,3	84,97	85,15
4	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	6,13	4,13	10,40	14,14	12,40

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kap/Th	109,46	100,86	77,25	99,54	94,83

Grafik II.1 Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kap/Th) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020



Capaian urusan pembangunan ketahanan pangan dapat diukur dengan indikator ketersediaan pangan utama. Ketersediaan Pangan merupakan ratio rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama (beras) pertahun (kg) didapat dari Neraca Bahan Makanan tahun 2020, dimana pada tahun 2019 ketersediaan pangan utama Kabupaten Natuna mencapai 99,54 kg/kap/th.

Menurunnya ketersediaan pangan utama sesuai dengan neraca bahan makanan tahun 2020, dikarenakan adanya perubahan pola konsumsi. Hal ini menandakan semakin beragamnya konsumsi pangan masyarakat.



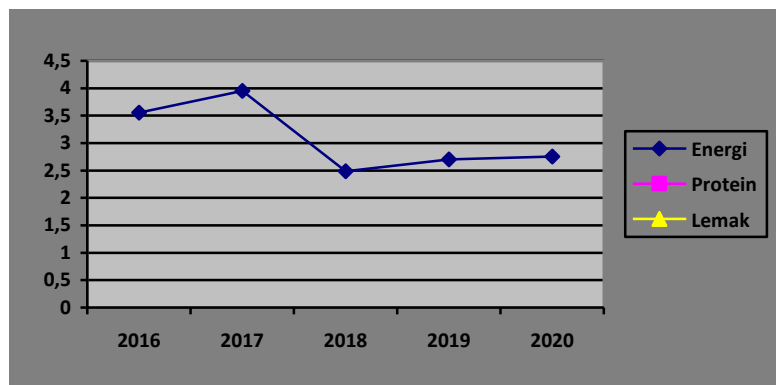
Adapun beberapa kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi bidang ini adalah :

1. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Natuna

Gambaran ketersediaan bahan pangan penduduk dapat ditunjukkan melalui Neraca Bahan Makanan (NBM) yang memberikan gambaran menyeluruhan tentang penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan disuatu daerah dalam kurun waktu tertentu, yang disusun dalam periode tahunan. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012, Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2400 kkal/kap/hr dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 63 gram/kap/hr.

Tabel II. Perkembangan Rata-Rata Ketersediaan energi dan protein Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020

Tahun	Energi (kkal/hr)	Protein	Lemak	Skor PPH
2016	3.552	189,93	167,06	67,82
2017	3.950	264,90	142,14	76,34
2018	2.488	190,60	43,00	70,01
2019	2.702	170,45	50,68	71,23
2020	2.754	215,67	50,12	73,22



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) rata-rata per kapita/hari ditahun 2016-2020 telah melebihi AKG dan AKP.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu :

- 1) produksi dalam negeri;
- 2) pemasokan pangan;
- 3) pengelolaan cadangan pangan.



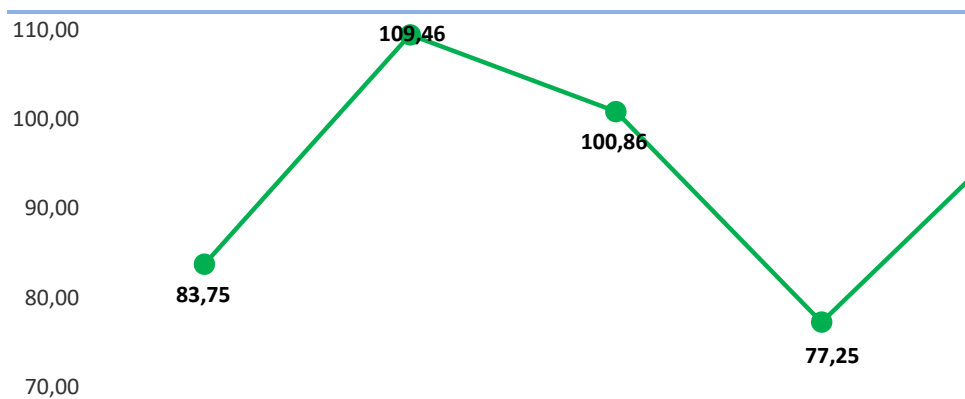
Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan.

Di bawah ini dapat dilihat indikator kinerja ketersediaan pangan utama selama tahun 2016-2021 :

Tabel II.8
Indikator Kinerja Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/tahun)

NO.	Indikator Kinerja	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/tahun)	109,46	100,86	77,25	99,54	94,83	94,14

Grafik II.1 Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)
Kabupaten Natuna, Tahun 2015-2019



Sumber: Neraca Bahan Makanan Tahun 2017 atap 2016 – 2020 atap 2019 Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna

Capaian urusan pembangunan ketahanan pangan dapat diukur dengan indikator ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan merupakan rasio rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama (beras) per tahun (kg) didapat dari Neraca Bahan Makanan tahun 2020, dimana pada tahun 2020 ketersediaan pangan utama Kabupaten Natuna mencapai 94,83 kg/kapita/tahun.



Menurunnya ketersediaan pangan utama sesuai dengan neraca bahan makanan tahun 2020, dikarenakan adanya perubahan pola konsumsi. Hal ini menandakan semakin beragamnya konsumsi pangan masyarakat.

Adapun beberapa kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi dibidang ini adalah sebagai berikut:

2. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Natuna

Gambaran ketersediaan bahan pangan penduduk dapat ditunjukkan melalui Neraca Bahan Makanan (NBM) yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan disuatu daerah dalam kurun waktu tertentu, yang disusun dalam periode tahunan. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012, Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2400 kkal/kap/hr dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 63 gram/kap/hr.

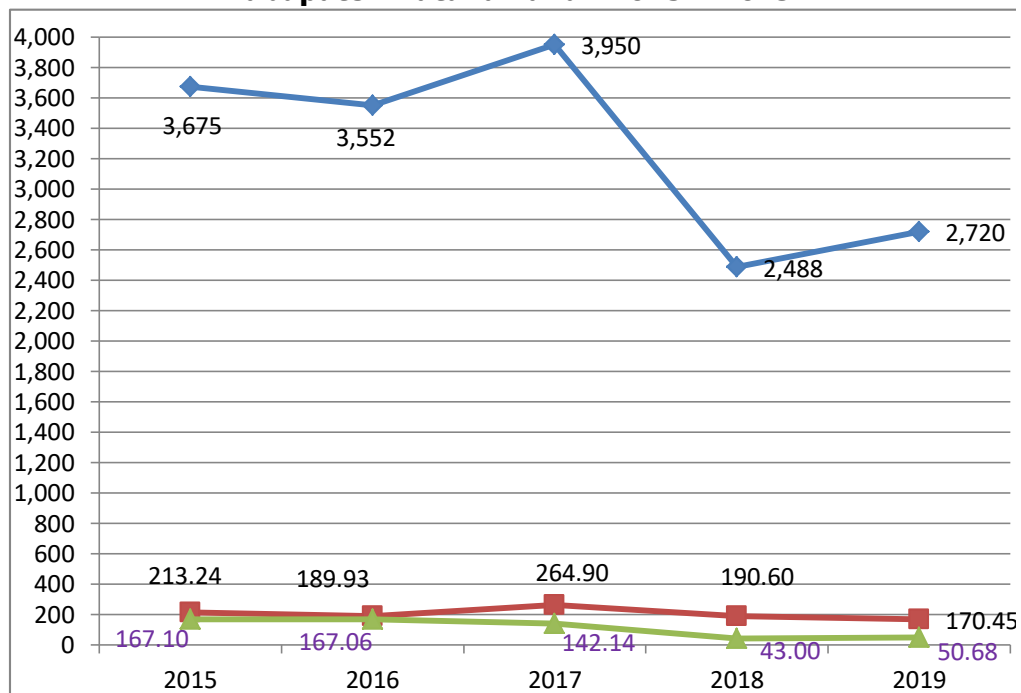
Tabel II.9
Perkembangan Rata-Rata Ketersediaan Energi dan Protein
Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2020

Tahun	Energi (kkal/hr)	Protein (gr/hr)	Lemak (gr/hr)
2016	3.552	189,93	167,06
2017	3.950	264,90	142,14
2018	2.488	190,60	43,00
2019	2.702	170,45	50,68
2020	2.754	215.67	50.12

Sumber Data : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna (diolah)



Grafik II.2
Perkembangan Rata-Rata Ketersediaan Energi dan Protein
Kabupaten Natuna Tahun 2015 – 2019



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) rata-rata per kapita/hari di tahun 2016-2020 telah melebihi AKG dan AKP, hal ini menandakan bahwa penduduk Natuna sudah mengonsumsi pangan yang beranekaragam.

Berdasarkan data dari FAO (19/03/2009) yang dilansir oleh WHO dilaporkan bahwa wanita memproduksi 60%-80% pangan di sebagian besar negara-negara berkembang dan bertanggungjawab pada sebagian produksi pangan dunia. Itu sebabnya perempuan berperan penting dalam berbagai bidang. Maka dari itu untuk memastikan peran perempuan di Kabupaten Natuna kami mengajak dari semua pihak untuk melibatkan perempuan. Maka dari itu, untuk menyelaraskan peran perempuan dalam penyediaan pangan, maka program dan kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna yang berbasis rumah tangga, salah satunya melalui program Peningkatan Difersifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sesuai dengan pengaruh utama gender sehingga bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Natuna.



REKAPITULASI DATA RTM TERBANTU DAN TERBINA TAHUN 2019

1. Terbantu

No	Kecamatan/Desa	Nama	Jenis Usaha
1	Kec. Bunguran Batubi	Nursalim	Usaha Kelontong
		Basuki	Perkebunan
		Aspirizal	Nelayan
		Adi Kusmiran	Nelayan
		Suratman	Pertanian
		Toharudin	Pertanian
		Djoko Wiji Utomo	Pertanian
		Amirudin	Usaha Klontong
		Said Romain	Nelayan
		Sutrisno	Pertanian
		Nursukeni	Perkebunan
		Burhanudin	Nelayan
		Asrof Sarif	Usaha Klontong
		Purwanto	Nelayan
2	Kec. Bunguran Tengah	Muhadirin	Berkebun
		Kadriono	Berkebun
		Salimin	Ternak Sapi
		Sunadi	Ternak Sapi
		Iksutikno	Ternak Sapi
		Mad Trisno	Ternak Sapi
		Narsu	Berkebun
		Selamat Md	Ternak Sapi
		Ngatiman	Ternak Sapi
		Suparto S	Pertukangan
		Tarmin	Dagang
		Rusmadi	Produksi Tempe
		Mariyam	Dagang
		Sugeng R	Usaha Kelontong
		Suraji	Dagang
		Suparmo	Peternakan
		Sukono	Peternakan
		Sakim	Bertani
		Saryono	Peternakan
		Turiman	Jasa Tukang
		Ilham Setiawan	Usaha Bengkel
		Suparmi	Usaha Kelontong
		Great	Peternakan



		Turyono	Peternakan
		Priyanto	Usaha Bengkel
		Tisan	Jasa Tukang
		Nurhayati	Usaha Cetak Batako
3	Desa Serantas	Patimah	Tani Perkebunan
		Amisma	Dagang Obat Herbal
		Murat	Berkebun
		Hasim	Berkebun
		Burhan	Berkebun
		Muhammad Ade	Berkebun
		Abdurrahman	Berkebun
		Nilam	Berkebun
		Bahrullazi	Berkebun
4	Desa Pengadah	Basrun	Nelayan
		M. Musa	Tani Perkebunan
		Yati	Tani Perkebunan
		Zaidin	Berkebun
		Muhaina	Jualan Kue
		Wahab	Nelayan
		Zainab	Berkebun
		Irwandi	Nelayan Tangkap
5	Desa Teluk Buton	Alidin	Nelayan
		Kamaruzzaman	Berkebun
		Aruna	Berkebun

2. Terbina

No	Kawasan/Desa	Nama	Acara Pembinaan
1	Kec. Bunguran Tengah	Ponidi	Pembekalan Dan Pembinaan Usaha Produktif Rumah Tangga Miskin
		Great	
		Tarja	
		Mardiono	
		Matohir	
		Sumiati	
		Gansar	
		Tiwayah	
		Raminah	
		Rujanah	
		Suriyami	
		Darsim	
		Zahardi	



		Zurkarnain	
		Bahrul	
		Oos	
		Yaman	
		Ngadiman	
		Suwati	
		Sarinah	
		Herman	
		Riono	
		Sardi	
		Paiman	
		Mirman	
		Atin	
		Ibrahim	
		Kamarudin	
		Darwis	
		Riki	
		Usman	
		Tursino	
		Sunari	
		Kartini	
2	Desa Teluk Buton	Zahrim	Pembekalan Dan Pembinaan Usaha Produktif Rumah Tangga Miskin
		Ahmad Yani	
		Muhamdin	
		Jaino	
		Kusnadi	
		Harun	
		Arjuna	
		Syamsudin	
		Ibrahim	
		Muslim	
		Musa	
		Rodi	
		Zaman W	
		Tuiman	
		Usman	
		Nasrum	
		Alun	
		Halimah	
		Tiami	
		Abidin	



		Muarmmad	
		Muslim	
		Hasan	
		B. Saripudin	
		Katul	
		Muhamad Nur	
		Samsul Bahri	
		Angga Saputra	
		Kamarudin	
		Redi Hartono	
		Zaman B	
		Ajis	
		Kamaruzaman	
		Tarzan	
		Jumadi	
		Bahrulazi	
3	Desa Serantas	M. Zen	Pembekalan Dan Pembinaan Usaha Produktif Rumah Tangga Miskin
		Samsul Bahri	
		Suryani	
		Murad	
		Hasim	
		Rodiati	
		Robiah	
		B. Sahigan	
		Ismail	
		Nazirudin	
		M. Yusup	
		M. Ade	
		Zahar	
		B. Kadi	
		Siti Hajarr	
		Anita	
		Hadian	
		Hamsiah	
		Wati	
		Kamsiah	
		Abdurrahman	
		Ibrahim Bm	
		Jamaludin	
		Zulkipli	
		Munir	



		Jamilah	
		Asmidi	
		Muhtar Hadi	
		Rusmina	
		Rodi	



Tabel II.10
Komposisi Ketersediaan Zat Gizi Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2020

No	Kelompok Bahan Makanan	2016				2017				2018				2019				2020			
		Energi		Protein		Energi		Protein		Energi		Protein		Energi	%	Protein	%	Energi	%	Protein	%
		(kkal)	%	(gr)	%	(kkal)	%	(gr)	%	(kkal)	%	(gr)		(kkal)		(gr)		(kkal)		(gr)	
1	Padi-padian	1097	30,88	25,88	13,63	1217	30,81	29,26	11,05	936	37,62	22,52	11,82	1207	44,65	29,9	17,54	1135	41,22	28,12	13,04
2	Makanan Berpati	45	1,27	0,38	0,20	64	1,62	0,37	0,14	79	3,17	0,49	0,26	91	3,36	0,53	0,31	52	1,88	0,33	0,15
3	Gula	154	4,34	-		156	3,95	0,03	0,01	184	7,39	0,00	0,00	181	6,71	0,06	0,03	154	5,58	0,05	0,02
4	Buah/ Biji Berminyak	572	16,10	5,65	2,97	394	9,97	4,05	1,53	68	2,73	6,85	3,59	94	3,49	6,71	3,93	85	3,08	5,47	2,54
5	Buah-buahan	17	0,48	0,19	0,10	25	0,63	0,30	0,11	7	0,28	0,09	0,05	8	0,29	0,1	0,06	29	1,06	0,39	0,18
6	Sayuran	16	0,45	0,69	0,36	18	0,46	0,86	0,32	79	3,17	3,49	1,83	17	0,64	0,75	0,44	16	0,60	0,85	0,40
7	Daging	47	1,32	3,13	1,65	18	0,46	1,71	0,65	46	1,85	3,07	1,61	47	1,75	3,02	1,77	28	1,02	1,77	0,82
8	Telur	14	0,39	1,13	0,59	3	0,08	0,23	0,09	24	0,96	1,94	1,02	31	1,15	2,49	1,46	27	0,96	2,12	0,98
9	Susu	12	0,34	0,64	0,34	8	0,20	0,41	0,15	7	0,28	0,35	0,18	10	0,38	0,54	0,32	8	0,29	0,42	0,20
10	Ikan	850	23,93	151,40	79,71	1198	30,33	227,09	85,73	758	30,46	151,80	79,64	612	22,64	126,31	74,10	849	30,84	176,08	81,65
11	Minyak dan Lemak	727	20,47	0,84	0,44	849	21,49	0,58	0,22	300	12,07	0,00	0,00	402	14,94	0,04	0,03	371	13,47	0,06	0,03
TOTAL		3552	100,00	189,93	100,00	100,00	100,00	264,89	100,00	2488	100,00	190,60	100,00	2702	100,00	170,45	100,00	2754	100,00	13,04	100,00

Sumber Data : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna (diolah)



3. Penyusunan Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Natuna

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu parameter sederhana untuk menilai keberhasilan penyediaan pangan, tingkat keanekaragaman/diversifikasi dan mutu pangan penduduk. Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang dikonsumsi semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutunya.

Di bawah ini dapat dilihat Skor PPH Kabupaten Natuna Tahun 2017-2020.



Tabel II.11
Nilai PPH Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020

A. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2016

No	Kelompok Bahan Makanan	Berat Pangan Gram/Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								Ket
			Energi (KKal/ Kapita)	%	% AKE	Bobot	Skor Aktua I	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH	
1.	Padi-padian	300.4	1.134,9	47.9	52.8	0.5	23.9	26.4	25.0	25.0	+
2.	Umbi-umbian	48.2	87.6	3.7	4.1	0.5	1.8	2.0	2.5	2.0	-
3.	Pangan hewani	195.4	341.1	14.4	15.9	2.0	28.8	31.7	24.0	24.0	+
4.	Minyak dan Lemak	37.6	368.1	15.5	17.1	0.5	7.8	8.6	5.0	5.0	+
5.	Buah / Biji Berminyak	12.6	139.2	5.9	6.5	0.5	2.9	3.2	1.0	1.0	+
6.	Kacang-kacangan	10.0	31.1	1.3	1.4	2.0	2.6	2.9	10.0	2.9	-
7.	Gula	37.7	165.5	7.0	7.7	0.5	3.5	3.8	2,5	2.5	+
8.	Sayuran dan buah	150.2	67.9	2.9	3.2	5.0	14.3	15.8	30.0	15.8	-
9.	Lain-lain	64.9	35.8	1.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Jumlah			2.371.4	100.0	110.3		85.7	94.5	100.0	78.2	

Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna (diolah)



B. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2017

No	Kelompok Bahan Makanan	Berat Pangan Gram/Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								Ket
			Energi (KKal/ Kapita)	%	% AKE	Bobot	Skor Aktua I	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH	
1.	Padi-padian	243,5	1.038,1	45,8	48,3	0.5	22,9	24,1	25,0	24,1	-
2.	Umbi-umbian	91,1	122,2	5,4	5,7	0.5	2,7	2,8	2,5	2,5	+
3.	Pangan hewani	261,2	357,7	15,8	16,6	2.0	31,5	33,3	24,0	24,0	+
4.	Minyak dan Lemak	36,8	329,8	14,5	15,3	0.5	7,3	7,7	5,0	5,0	+
5.	Buah / Biji Berminyak	17,2	92,1	4,1	4,3	0.5	2,0	2,1	1,0	1,0	+
6.	Kacang-kacangan	16,9	39,1	1,7	1,8	2.0	3,4	3,6	10,0	3,6	-
7.	Gula	47,5	172,9	7,6	8,0	0.5	3,8	4,0	2,5	2,5	+
8.	Sayuran dan buah	176,1	88,2	3,9	4,1	5,0	19,5	20,5	30,0	20,5	-
9.	Lain-lain	62,7	27,6	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Jumlah			2.267,7	100,0	105,5		93,1	98,2	100,0	83,3	

Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna (diolah)



C. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2018

No	Kelompok Bahan Makanan	Berat Pangan Gram/Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
			Energi(K Kal/ Kapita)	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH	Ket
1.	Padi-padian	295,8	1.236,1	51,0	57,5	0,5	25,5	28,7	25,0	25,00	+
2.	Umbi-umbian	47,6	64,0	2,6	3,0	0,5	1,3	1,5	2,5	1,49	-
3.	Pangan hewani	233,8	339,3	14,0	15,8	2,0	28,0	31,6	24,0	24,00	+
4.	Minyak dan Lemak	40,3	361,6	14,9	16,8	0,5	7,5	8,4	5,0	5,00	+
5.	Buah / Biji Berminyak	14,7	79,1	3,3	3,7	0,5	1,6	1,8	1,0	1,00	+
6.	Kacang-kacangan	16,1	35,9	1,5	1,7	2,0	3,0	3,3	10,0	3,34	-
7.	Gula	45,1	169,4	7,0	7,9	0,5	3,5	3,9	2,5	2,50	+
8.	Sayuran dan buah	183,9	97,4	4,0	4,5	5,0	20,1	22,6	30,0	22,64	-
8.	Lain-lain	70,1	43,2	1,8	2,0	-	-	-	-	-	
9.											
Jumlah			2.425,9 6	100,0	112,8		90,4	102,0	100,0	84,97	

Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna (diolah)



D. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2019

No	Kelompok Bahan Makanan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								Ket
			Energi(KKal/Kapita)	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH	
1.	Padi-padian	278,8	1.158,0	51,7	53,8	0,5	25,9	26,9	25,0	25,00	+
2.	Umbi-umbian	42,7	60,0	2,7	2,8	0,5	1,3	1,4	2,5	1,40	-
3.	Pangan hewani	218,5	312,0	14,0	14,5	2,0	27,9	29,1	24,0	24,00	+
4.	Minyak dan Lemak	36,3	325,0	14,5	15,1	0,5	7,3	7,6	5,0	5,00	+
5.	Buah / Biji Berminyak	13,3	71,0	3,2	3,3	0,5	1,6	1,7	1,0	1,00	+
6.	Kacang-kacangan	12,9	29,0	1,3	1,3	2,0	2,6	2,7	10,0	2,70	-
7.	Gula	38,0	143,0	6,4	6,7	0,5	3,2	3,3	2,5	2,50	+
8.	Sayuran dan buah	189,7	101,0	4,5	4,7	5,0	22,7	23,6	30,0	23,60	-
9.	Lain-lain	66,5	38,0	1,7	1,8	-	-	-	-		
	Jumlah		2.238,21	100,0	104,10		92,40	96,19	100,0	85,15	

Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna (diolah)



E. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2020

No	Kelompok Bahan Makanan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								Ket
			Energi(KKal/ Kapita)	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH	
1.	Padi-padian	278,7	1.185,0	52,2	55,1	0.5	26,1	27,6	25,0	25,00	+
2.	Umbi-umbian	44,6	58,0	2,5	2,7	0.5	1,3	1,3	2,5	1,30	-
3.	Pangan hewani	234,3	334,0	14,7	15,5	2.0	29,4	31,1	24,0	24,00	+
4.	Minyak dan Lemak	37,4	335,0	14,8	15,6	0.5	7,4	7,8	5,0	5,00	+
5.	Buah / Biji Berminyak	10,3	56,0	2,5	2,6	0.5	1,2	1,3	1,0	1,00	+
6.	Kacang-kacangan	13,9	30,0	1,3	1,4	2.0	2,7	2,8	10,0	2,80	-
7.	Gula	38,4	144,0	6,3	6,7	0.5	3,2	3,3	2,5	2,50	+
8.	Sayuran dan buah	190,5	89,0	3,9	4,2	5.0	19,7	20,8	30,0	20,8	-
9.	Lain-lain	60,0	39,0	1,7	1,8	-	-	-	-	-	
	Jumlah		2.269,00	100.0	105,5		90,9	96,0	100.0	82,43	



4. Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

SKPG merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian-kejadian rawan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi. Tujuan disusunnya SKPG adalah untuk memberikan informasi tentang situasi pangan dan gizi kepada masyarakat, organisasi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak pengambil kebijakan, seperti Bupati/Walikota dan Gubernur dalam mengintervensi daerah yang dianggap rawan pangan.

Penyusunan SKPG dilihat dari 3 aspek, yaitu :

1. Akses Ketersediaan, merupakan data terkait dengan luas tanam bulan berjalan, luas tanam 5 tahun terakhir pada bulan yang sama, luas puso bulan berjalan, luas puso 5 tahun terakhir pada bulan yang sama;
2. Akses/Keterjangkauan, merupakan data terkait dengan harga bahan pangan (beras) pada bulan berjalan dan harga bahan pangan 3 bulan terakhir;
3. Akses Pemanfaatan, merupakan data terkait dengan jumlah balita yang terdaftar, jumlah balita yang ditimbang terkoreksi, jumlah balita naik berat badan, jumlah balita dibawah garis merah dan jumlah balita tidak naik berat badan ditimbang 2 kali.



Tabel II.12
Sistem Kewaspadaaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Natuna Tahun 2019

SKPG Bulan Januari-Maret 2019

NO	KECAMATAN	BULAN											
		JANUARI				FEBRUARI				MARET			
		Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan
1	Bunguran Timur	Waspada	Aman	Aman	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
2	Bunguran Timur Laut	Rentan	Aman	Aman	Rawan	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
3	Bunguran Tengah	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
4	Bunguran Selatan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Rawan	Rawan
5	Bunguran Barat	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
6	Bunguran Utara	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
7	Pulau Tiga	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Waspada
8	Pulau Laut	Waspada	Aman	Aman	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Aman
9	Midai	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Rawan	Aman	Rawan	Waspada	Aman	Aman	Rawan
10	Serasan	Rawan	Waspada	Aman	Rawan	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman
11	Serasan Timur	Rawan	Aman	Aman	Rawan	Rawan	Aman	Aman	Rawan	Rawan	Aman	Aman	Rawan
12	Subi	Aman	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Rawan
13	Pulau Tiga Barat	Waspada	Rawan	Aman	Rawan	Waspada	Rentan	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
14	Suak Midai	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Rentan	Aman	Rawan	Waspada	Rawan	Aman	Rawan



15	Bunguran Batubi	Waspada	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Rawan
----	-----------------	---------	------	---------	-------	---------	------	---------	---------	---------	------	---------	-------

SKPG Bulan April - Juni 2019

NO	KECAMATAN	BULAN											
		APRIL				MEI				JUNI			
		Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan
1	Bunguran Timur	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Rawan	Rawan
2	Bunguran Timur Laut	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Rawan
3	Bunguran Tengah	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Rawan
4	Bunguran Selatan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
5	Bunguran Barat	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Rawan	Rawan	Aman	Waspada	Aman
6	Bunguran Utara	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
7	Pulau Tiga	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
8	Pulau Laut	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
9	Midai	Waspada	Rawan	Aman	Rawan	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman
10	Serasan	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
11	Serasan Timur	Rawan	Aman	Aman	Rawan	Rawan	Aman	Aman	Rawan	Rawan	Aman	Aman	Rawan
12	Subi	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
13	Pulau Tiga Barat	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Aman



14	Suak Midai	Waspada	Rawan	Aman	Rawan	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Aman
15	Bunguran Batubi	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada

SKPG Bulan Juli - September 2019

NO	KECAMATAN	BULAN											
		JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan
1	Bunguran Timur	Wapada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Rawan	Rawan
2	Bunguran Timur Laut	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Aman
3	Bunguran Tengah	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Rawan
4	Bunguran Selatan	Waspada	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Rawan	Waspada	Rawan	Waspada	Rawan	Waspada	Rawan
5	Bunguran Barat	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Rawan	Rawan	Aman	Waspada	Rawan
6	Bunguran Utara	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
7	Pulau Tiga	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
8	Pulau Laut	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
9	Midai	Waspada	Rentan	Aman	Rawan	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman
10	Serasan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Rawan	Waspada	Rawan	Waspada	Rawan
11	Serasan Timur	Rawan	Aman	Aman	Rawan	Waspada	Aman	Aman	Aman	Rawan	Aman	Aman	Rawan
12	Subi	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada



13	Pulau Tiga Barat	Waspada	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
14	Suak Midai	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman
15	Bunguran Batubi	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada

SKPG Bulan Oktober - Desember 2019

NO	KECAMATAN	BULAN											
		Oktober				November				Desember			
		Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan
1	Bunguran Timur	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Rawan	Rawan
2	Bunguran Timur Laut	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
3	Bunguran Tengah	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Rawan
4	Bunguran Selatan	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
5	Bunguran Barat	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
6	Bunguran Utara	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman
7	Pulau Tiga	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
8	Pulau Laut	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
9	Midai	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman
10	Serasan	Waspada	Rawan	Aman	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada



11	Serasan Timur	Waspada	Aman	Aman	Aman	Rawan	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Waspada	Aman
12	Subi	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Aman	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
13	Pulau Tiga Barat	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
14	Suak Midai	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada
15	Bunguran Batubi	Rawan	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada



Tabel V.5
Sistem Kewaspadaaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Natuna Tahun 2020

SKPG Bulan Januari-Maret 2020

NO	Kecamatan	BULAN											
		JANUARI				FEBRUARI				MARET			
		Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan
1	Bunguran Timur	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Rawan	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
2	Bunguran Timur Laut	Rentan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
3	Bunguran Tengah	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Rawan
4	Bunguran Selatan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
5	Bunguran Barat	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
6	Bunguran Batubi	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Rawan	Rawan	Aman	Waspada	Rawan
7	Bunguran Utara	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
8	Pulau Tiga	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada



9	Pulau Tiga Barat	Waspada	Aman	Rawan	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
10	Pulau Laut	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
11	Midai	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman
12	Suak Midai	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
13	Serasan	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
14	Serasan Timur	Rawan	Aman	Aman	Rawan	Rawan	Aman	Aman	Rawan	Rawan	Aman	Aman	Rawan
15	Subi	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Rawan	Rawan

SKPG Bulan April - Juni 2020

NO	KECAMATAN	BULAN											
		APRIL				MEI				JUNI			
		Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan
1	Bunguran Timur	Waspada	Aman		Rawan	Waspada	Aman		Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
2	Bunguran Timur Laut	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
3	Bunguran Tengah	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Rawan
4	Bunguran Selatan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada



5	Bunguran Barat	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
6	Bunguran Batubi	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Waspada	Aman
7	Bunguran Utara	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
8	Pulau Tiga	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
9	Pulau Tiga Barat	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Aman
10	Pulau Laut	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
11	Midai	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman
12	Suak Midai	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman
13	Serasan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
14	Serasan Timur	Rawan	Aman	Aman	Rawan	Rawan	Aman	Aman	Rawan	Waspada	Aman	Aman	Aman
15	Subi	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada

SKPG Bulan Juli - September 2020

NO	KECAMATAN	BULAN											
		JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan
1	Bunguran Timur	Wapada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada



2	Bunguran Timur Laut	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
3	Bunguran Tengah	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
4	Bunguran Selatan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
5	Bunguran Barat	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Rawan
6	Bunguran Batubi	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
7	Bunguran Utara	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
8	Pulau Tiga	Waspada		Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
9	Pulau Tiga Barat	Waspada		Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
10	Pulau Laut	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
11	Midai	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman
12	Suak Midai	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Aman
13	Serasan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
14	Serasan Timur	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Rawan	Aman	Aman	Rawan
15	Subi	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada



SKPG Bulan Oktober - Desember 2020

NO	KECAMATAN	BULAN											
		Oktober				November				Desember			
		Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	Aspek Ketersediaan Pangan	Aspek Akses Pangan	Aspek Pemanfaatan Pangan	Indeks Komposit Ketahanan Pangan
1	Bunguran Timur	Waspada	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
2	Bunguran Timur Laut	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Aman
3	Bunguran Tengah	Waspada	Aman	Rawan	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Rawan	Aman	Waspada	Rawan
4	Bunguran Selatan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
5	Bunguran Barat	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
6	Bunguran Batubi	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Rawan	Aman	Aman	Waspada	Aman
7	Bunguran Utara	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
8	Pulau Tiga	Waspada	Aman	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
9	Pulau Tiga Barat	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
10	Pulau Laut	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
11	Midai	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman
12	Suak Midai	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Aman	Aman	Aman



13	Serasan	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada
14	Serasan Timur	Rawan	Aman	Aman			Aman	Waspada	Rawan	Aman	Aman	Waspada	Aman
15	Subi	Waspada	Aman	Waspada		Waspada	Aman		Rawan	Waspada	Aman		Rawan



5. Melaksanakan Pendampingan Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Kegiatan Demapan merupakan salah satu kegiatan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pembangunan sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan sehingga menjadi kaum yang mandiri. Kegiatan berupa pemberian bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 per desa, yang dikucurkan kepada masyarakat desa sasaran, dengan sistem dana bantuan bergulir guna mengembangkan usaha produktif masyarakat sasaran. Yang menjadi sasaran adalah masyarakat rawan pangan/miskin atau Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teridentifikasi melalui survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT). Sedangkan usaha produktif berupa : 1) On-Farm (budidaya pertanian, peternakan, perikanan); 2) Off Farm (pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan); dan 3) Non Farm (jasa, toko kelontong, bengkel, dll).

Pada kegiatan Demapan, terdiri 3 tahap, yaitu : Tahap Penumbuhan (tahun pertama); Tahap Pengembangan (tahun kedua); dan Tahap Kemandirian (tahun ketiga). Pengelolaan dana di tingkat desa melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang kepengurusannya dari unsur desa dan/atau masyarakat setempat. Kegiatan Demapan ada 4 kecamatan tersebar di desa, yaitu : Tahun 2009 di Desa Kelarik Kec. Bunguran Utara, Tahun 2009 di Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga, Tahun 2011 di Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut, Tahun 2012 di Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel II.13
Kondisi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Natuna Tahun 2019

No	KECAMATAN	DESA	Nama-nama Kelompok Afinitas	Tahun Berdiri	Dana Awal (Rp.000)	Dana Akhir (Rp.000)	Pengurus Lembaga Keuangan Desa (LKD)			Pengurus Tim Pangan Desa (TPD)		
							Ketua	Sekretaris	Bendahara	Ketua	Sekretaris	Bendahara
1.	Bung. Utara	Kelarik Utara	Kerapu	2009	100,000	104,825	Yurnita	Amrina – Pulungan	Nurhayati	Ibrahim	Isjaya	Rusnahayati
			Empat Serangkai									
			Usaha Mandiri									
2.	Pulau Tiga	Serantas	Mutiara Laut	2009	100,000	103,619	M. Zen	Samsul – Bahari	Suryani	Hasanudin	Marzuki	M. Zein
			Kuda Laut									
			Maju Jaya									
3.	Bung. Timur Laut	Pengadah	Tunas Rezki	2011	100,000	105,850	Dores – Monita	Kamalia	Idawati	Armizan	Diana	M. Daud
			Rasa yakin									
4.	Bung. Utara	Teluk-Buton	Batu Penai	2012	100,000	112,108	Hazarmi	Sayuti	Junaidi	Abdul Rahman	Erwin	Hasmidar
			Batu Kuning									

Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna



Tabel II.14
Kondisi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Natuna Tahun 2020

No	KECAMATAN	DESA	Nama-nama Kelompok Afinitas	Tahun Berdiri	Dana Awal (Rp.000)	Dana Akhir (Rp.000)	Pengurus Lembaga Keuangan Desa (LKD)			Pengurus Tim Pangan Desa (TPD)		
							Ketua	Sekretaris	Bendahara	Ketua	Sekretaris	Bendahara
1.	Bung. Utara	Kelarik Utara	Kerapu	2009	100.000	103.907	Yurnita	Amrina – Pulungan	Nurhayati	Zafidrin	Anna	Rina
			Empat Serangkai									
			Usaha Mandiri									
2.	Pulau Tiga	Serantas	Mutiara Laut	2009	100.000	105.550	M. Zen	Samsul – Bahari	Suryani	Hasanudin	Marzuki	Harun
			Kuda Laut									
			Maju Jaya									
3.	Bung. Timur Laut	Pengadah	Tunas Rezki	2011	100.000	111.982	Dores – Monita	Deni	Sanderlela	Armizan	Diana	M. Daud
			Rasa yakin									
4.	Bung. Utara	Teluk-Buton	Batu Penai	2012	100,000	107.909	Junaidi	Sayuti	Zailidar	Abdul Rahman	Zaman B	Hasmidar
			Batu Kuning									

Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna



6. Melaksanakan Pendampingan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP)

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) juga merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pembangunan sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan kawasan (terdiri dari 3 – 5 pemberian bantuan dana melalui 3 tahap, yang setiap tahapnya diberikan bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- per kawasan, sehingga total bantuan sebesar Rp. 600.000.000,- per kawasan. Masyarakat yang menjadi sasaran adalah masyarakat rawan pangan/miskin atau Rumah Tangga Miskin yang teridentifikasi melalui Survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT). Pada kegiatan terdiri dari 5 tahap, yaitu : Tahap Persiapan, Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian, dan Tahap Eksisting Program. Pengelolaan dana di tingkat desa melalui Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) yang kepengurusannya dari unsur kecamatan/desa/masyarakat setempat.

Kegiatan KMP di Kabupaten Natuna ada 2 kawasan, yaitu Kawasan Bunguran Tengah (Desa Tapau, Desa Harapan Jaya dan Desa Air Lengit) dan Kawasan Bunguran Batubi (Desa Batubi Jaya, Desa Gunung Putri, Desa Sedarat Baru, Desa Semedang dan Desa Sedanau Timur) yang pelaksanaannya sejak tahun 2013. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel II.14
Kondisi Kawasan Mandiri Pangan di Kabupaten Natuna Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa	Nama-nama kelompok	Tahun Berdiri	Dana Awal (Rp)	Dana Akhir (Rp)	PENGURUS TPD (FKK,LKK dan PENDAMPING	JENIS USAHA
01.	Bunguran Tengah	Harapan Jaya	Usaha Mandiri	2013	600.000.000	655.432.000	Fkk : Ketua : Amirudin Sekretaris : Daryati Anggota : Sahikun	- Peternakan -Pertanian - Perikanan -Home Industri -Perkebunan - Perdagangan
			Karya Mandiri					
		Tapau	Karya Jaya					
			Sinar Jaya					
			Persada					
			Permata					
		Air Lengit	Jaya mandiri					
			KaryaTani					
			Mitra Jaya					
02.	Bunguran batubi	Batubi Jaya	Mitra Usaha	2013	600.000.000	641.667.000	Fkk Ketua : Nur Parta S Sekretaris : Edi Sudiono Anggota : Gunawan	-Peternakan -Pertanian -Perikanan -Home Industri -Perkebunan - Perdagangan
			Bhakti Mulia					
			Rumput Usaha					
		Gunung Putri	Putri Gunung					
			Putra Gunung					
			Regel					
		Sedarat Baru	Serba Makmur					
			Ragam Usaha					
			Melati					
		Semedang	Hasanah					
			Tanjung Biru					
			Mulia rezeki					
		Sedanau Timur	Barakuda					
			Kurnia Jaya					
			Barokah					



Tabel II.14
Kondisi Kawasan Mandiri Pangan di Kabupaten Natuna Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Nama-nama kelompok	Tahun Berdiri	Dana Awal (Rp)	Dana Akhir (Rp)	PENGURUS TPD (FKK,LKK dan PENDAMPING	JENIS USAHA
01.	Bunguran Tengah	Harapan Jaya	Usaha Mandiri	2013	600.000.000	655.432.000	Fkk : Ketua : Amirudin Sekretaris : Daryati Anggota : Sahikun	- Peternakan -Pertanian - Perikanan -Home Industri -Perkebunan - Perdagangan
			Karya Mandiri					
		Tapau	Karya Jaya					
			Sinar Jaya					
			Persada					
			Permata					
		Air Lengit	Jaya mandiri					
			KaryaTani					
			Mitra Jaya					
02.	Bunguran batubi	Batubi Jaya	Mitra Usaha	2013	600.000.000	641.667.000	Fkk : Ketua : Nur Parta S Sekretaris : Edi Sudiono Anggota : Gunawan	-Peternakan -Pertanian -Perikanan -Home Industri -Perkebunan - Perdagangan
			Bhakti Mulia					
			Rumput Usaha					
		Gunung Putri	Putri Gunung					
			Putra Gunung					
			Regel					
		Sedarat Baru	Serba Makmur					
			Ragam Usaha					
			Melati					
		Semedang	Hasanah					
			Tanjung Biru					
			Mulia rezeki					
		Sedanau Timur	Barakuda					
			Kurnia Jaya					
			Barokah					



7. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan

Sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Natuna memiliki bangunan yang digunakan sebagai tempat cadangan pangan sebanyak 8 unit. Pembangunannya telah dimulai sejak tahun 2011 yang tersebar di 6 kecamatan. Yang dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Bangunan yang ada memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu sebagai lumbung pangan yang berstatus sebagai Cadangan Pangan Masyarakat (CPM), dan Gudang Cadangan Pangan yang berstatus Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Adapun data Bangunan Lumbung Pangan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.15
Data Kelompok Lumbung Pangan Kabupaten Natuna
Sampai Dengan Tahun 2020

No	Desa/ Kecamatan	Nama Kelompok	Tahun Berdiri	Tahun Pengisian		Pengurus	Pengisian (Kg)
				APBN	APBD		
1	Desa Batubi Jaya	Baru Maju	2011	2012		Ketua : Aminah	20.000.000
				2013		Sekretaris : Asriatun	20.000.000
						Bendahara : Ani S	
2	Desa Belakang Gunung Bunguran Utara	Abadi	2011	2015	2019	Ketua : Rizkyana	20.000.000
						Sekretaris : Junati	20.000.000
						Bendahara: Aminah	
3	Desa Pengadah Bunguran Timur Laut	Harapan Baru	2012		2019	Ketua : Anuar Sahri	
						Sekretari : Ila Ernawati	20.000.000
						Bendahara : Destiyani	
4	Desa Payak Serasan	Kebajikan	2012		2019	Ketua : Indah L	20.000.000



Timur					Sekretaris : Hasmawati	
					Bendahara : Juliana	
5	Desa Air Payang	Perbatasan	2013	2015	Ketua : Trianisari	20.000.000
	Pulau Laut				Sekretaris : Erawati	
					Bendahara: Rosidawati	
6	Desa Tanjung Pala	Rezeki Baru	2014		Ketua : Andika	20.000.000
	Pulau Laut			2017	Sekretaris : Detsi W	20.000.000
				2019	Bendahara: Sumarni	
7	Desa Selading	Sumber Rezeki	2014	2017	Ketua : Asparizal	20.000.000
	Pulau Tiga Barat			2019		20.000.000
					Sekretaris : Sabrianto	
					Bendahara: Marhalis	
8	Desa Sededap	Usaha Bersama	2014	2017	Ketua : Haromain	20.000.000
	Pulau Tiga				Sekretaris : Januar E	
					Bendahara : Sumiati	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Natuna (diolah)

Pada tahun 2015 melalui APBD I dilaksanakan kegiatan Pengisian Lumbung tahap pengembangan pada Kelompok Pangan Abadi Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara yang dibangun pada tahun 2010 dan Kelompok Pangan Perbatasan Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut yang dibangun pada tahun 2013.

Adapun uraian belanja atau penggunaan dana tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai berikut :



Tabel II.16
Data Pengisian Lumbung Pangan Berstatus Cadangan Pangan Masyarakat
Kabupaten Natuna Tahun 2017-2020

No	Nama Kelompok Pengelola	Kegiatan	Volume (kg)	Jumlah Biaya (Rp.)
1.	Pangan Perbatasan	-Pembelian beras Cap Lombok	1.000	10.000.000,-
		-Pembelian beras Cap Tomat	1.000	10.000.000,-
		Jumlah	2.000	20.000.000,-
2.	Pangan Abadi	-Pembelian beras Cap Anak Terbang	500	5.500.000,-
		-Pembelian beras Cap Payung	250	3.500.000,-
		-Pembelian beras Cap Lombok	925	11.000.000,-
		Jumlah	1.675	20.000.000,-
3.	Usaha Bersama	-Beras	1.250	20.000.000,-
4.	Sumber Rezeky	-Beras	1.250	20.000.000,-
5.	Rezeki Baru	-Beras	750	9.750.000
		-Gula Pasir	150	2.250.000
		-Terigu	300	3.000.000
		-Telur	36 papan	1.800.000
		-Minyak Goreng	100 liter	<u>3.200.000</u>
				20.000.000,-
6.	Abadi	-Beras cap Anak Terbang	25.000	20.000.000,-
		-Beras Bulog	1.000	10.000.000,-
		-Beras cap Lombok	650	10.000.000,-
		Jumlah		40.000.000,-
7.	Sumber Rezeki	-Beras Cap Jambu	25.000	20.000.000,-
		-Beras Bulog	1.000	10.000.000,-
		-Beras Cap Payung	650	10.000.000,-
		Jumlah		40.000.00,-

Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna (diolah)

8. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Kegiatan Cadangan pangan Pemerintah (CPP) merupakan kegiatan yang memberikan bantuan bahan pangan pokok berupa beras kepada masyarakat rawan pangan transien maupun kronis. Ditahun 2020, pemerintah daerah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan pengadaan beras CPP sebanyak 20 ton atau 20.000 kg. Sementara sisa beras tahun sebelumnya di gudang bulog masih ada sebanyak 2,552 atau 2.552 kg. Jadi total jumlah beras di tahun 2019 sebanyak 22,552 kg.



Sedangkan penyalurannya secara keseluruhan di tahun yang sama sebanyak 7.832 kg dan sisanya menjadi 14.720 kg.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat melalui tabel berikut ini :

Tabel II.17
Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2017-2020

NO	TAHUN	JUMLAH PENGADAAN (Kg)	JUMLAH YANG DISALURKAN	JUMLAH KK/JIWA	SISA (Kg)	KETERANGAN
1	2017	19.500	2.228	28 KK	17.220	31 Desember 2017
2	2018	-	14.668	298 KK/ 1048 Jiwa	2.552	31 Desember 2018
3	2019	-	2.552	131 KK/ 317 Jiwa	-	18 Nopember 2019
4	2019	20.000	7.832	333 KK/ 652 Jiwa	14.720	16 Desember 2019
5	2020	-	14.720	1.790	-	16 Juni 2020
6	2020	11.000	11.000	1.367	-	2 November 2020
7	2020	9.440	3.880	111	5.560	2 Desember 2020

9. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat usaha pada unit distribusi/pemasaran/pengolahan dan unit pengelolaan cadangan pangan khususnya dalam melakukan kegiatan pembelian-penjualan gabah/beras/jagung dan/atau penyediaan cadangan pangan bagi anggota gapoktan disaat menghadapi jatuhnya harga gabah, beras dan atau jagung disaat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan oleh gabungan kelompok tani (gapoktan).

Pemerintah menyalurkan dana bansos dari APBN kepada Gapoktan dalam rangka memberdayakan kelembagaan tersebut agar mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian pangan serta penyediaan cadangan pangan. Adapun sasaran dari kegiatan



penguatan LDPM ini adalah Gapoktan yang berada di wilayah sentra padi. Pada tahun 2015 Gapoktan Cipta Jaya Makmur Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi bansos oleh pemerintah pusat 2 (dua) kali tahapan, yaitu pada tahap penumbuhan sebesar Rp. 150.000.000,- dan tahap pengembangan sebesar Rp. 75.000.000,-. Pada tahun 2015 Gapoktan Cipta Jaya Makmur masuk pada tahap penumbuhan.

10. Kegiatan Pengambilan Data Panel Harga

Merupakan pengambilan data harga di tingkat pedagang (pengecer, grosir dan pasar kabupaten) yang secara berkala (seminggu sekali) diambil sebanyak 26 komoditi dengan metode survey dan wawancara kepada pedagang, baik eceran maupun grosir serta pedagang yang menjadi sampel pengambilan data panel harga.



Tabel II.18
Daftar Harga Rata-rata Komoditi di Kabupaten Natuna Tahun 2017 – 2020

No	Variabel / Komoditas	Tahun				Harga rata-rata 4 tahun	Perubahan harga (%)		Perubahan harga (Rp)		CV Ratio (%)	Kondisi
		2017	2018	2019	2020		2019 vs 2018	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2020 vs 2019		
1	Beras Premium	29.000	-	-	15.810	22.405	0	0	0	0	0	0
2	Beras Medium	13.751	14.448	14.227	14.280	14.177	-1,53	0,37	-221	53	2,108	S
3	Beras Termurah	10.915	12.347	8.395	10.472	10.532	-32,01	24,74	-3.952	2.077	15,516	TS
4	Jagung	9.750	10.745	9.038	10.500	10.008	-15,89	16,18	-1.707	1.462	7,724	S
5	Kedelai	9.900	9.818	4.000	10.385	8.526	-59,26	159,63	-5.818	6.385	35,510	TS
6	Bawang Merah	36.096	33.752	37.558	44.575	37.995	11,28	18,68	3.806	7.017	12,260	TS
7	Bawang Putih (Bonggol)	-	34.216	36.945	45.205	38.789	7,98	22,36	2.729	8.260	14,751	TS
8	Bawang Putih (Kating)	-	-	-	-	0	0,00	0,00	0	0	0,000	
9	Cabe Merah Keriting	70.500	62.890	44.138	78.640	64.042	-29,82	78,17	-18.752	34.502	23,025	TS
10	Cabe Rawit	-	67.808	65.747	81.205	71.587	-3,04	23,51	-2.061	15.458	11,725	TS
11	Daging Sapi Murni	119.913	132.296	60.847	122.472	108.882	-54,01	101,28	-71.449	61.625	29,817	TS
12	Daging Ayam Ras	38.402	41.674	36.506	44.099	40.170	-12,40	20,80	-5.168	7.593	8,411	S
13	Telur Ayam Ras	26.679	26.761	31.438	30.801	28.920	17,48	-2,03	4.677	-637	8,830	S
14	Gula Pasir Lokal	14.160	13.053	12.989	14.540	13.686	-0,49	11,94	-64	1.551	5,723	S
15	Minyak Goreng Curah	15.088	14.639	14.560	14.508	14.699	-0,54	-0,36	-79	-52	1,803	S
16	Tepung Terigu	8.736	8.589	9.153	9.414	8.973	6,57	2,85	564	261	4,222	S

Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna (diolah)



Perkembangan kondisi harga bahan pangan strategis selama 3 tahun mulai tahun 2017 - 2019 dari 16 komoditi bahan pangan strategis 13 komoditi stabil, cv ratio <10%, yaitu pada komoditi beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih bonggol, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng dan terigu. Kestabilan harga ke 13 komoditi ini dikarenakan pasokan yang cukup dan harga secara nasional stabil, tidak terjadi kenaikan harga secara signifikan.

Komoditi yang mengalami fluktuasi harga yang signifikan sehingga cv ratio tidak stabil pada komoditi cabe merah keriting dan cabe rawit, dimana cv ratio berkisar 13,7% untuk cabe merah keriting dan 16,2% untuk cabe rawit. Ketidak stabilan ini disebabkan kenaikan kedua harga komoditi secara nasional.

11. Kegiatan Pengambilan Data Panel Harga Strategis

Kegiatan pengambilan Panel Harga Strategis merupakan pengambilan data harga pasar di tingkat pedagang (pengecer, grosir dan pasar kabupaten/Ranai), yang dilaksanakan hanya pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan Hari Natal, dengan jumlah harga komoditas yang diambil sebanyak 14 komoditas, dengan metode survey dan wawancara kepada pedagang, baik eceran maupun grosir serta pedagang di pasar yang menjadi sampel pengambilan data panel harga strategis.

Untuk Hari Raya Idul Fitri, pengambilan data dilaksanakan sepuluh hari sebelum lebaran (H-10), sedangkan untuk Hari Raya Idul Adha dilaksanakan satu hari sebelum lebaran (H-1), dan untuk Hari Natal dilaksanakan enam hari sebelum lebaran (H-6). Adapun daftar panel harga strategis dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel II.19
Panel Harga Strategis HBKN (5 Hari Menjelang Puasa) Tahun 2017

No	Komoditi	Tanggal dan Harga / Kg				
		22 Mei 2017	23 May 2017	24 May 2017	25 May 2017	26 May 2017
1	Kacang Tanah	20,000	20,000	20,000	22,000	22,000
2	Tepung Terigu	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
3	Minyak Goreng	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
4	Daging Sapi Murni	120,000	120,000	120,000	130,000	130,000
5	Telur Ayam Ras	21,333	21,333	21,333	21,333	21,333
6	Daging Ayam Ras	34,000	34,000	34,000	35,000	35,000
7	Cabe Merah	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
8	Keriting	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
9	Bawang Merah	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
10	Gula Pasir Lokal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Kedelai	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	Jagung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Beras Termurah	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Beras Medium	-	-	-	-	-
	Beras Premium					

Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna (diolah)



Tabel II.20
Panel Harga Strategis HBKN (10 Hari Menjelang Lebaran) Tahun 2017

No	Komoditi	Tanggal dan Harga / Kg									
		15-Jun-17	16-Jun-17	17-Jun-17	18-Jun-17	19-Jun-17	20-Jun-17	21-Jun-17	22-Jun-17	23-Jun-17	24-Jun-17
1	Kacang Tanah	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	Tepung Terigu	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
3	Minyak Goreng	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	Daging Sapi Murni	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
5	Telur Ayam Ras	23.467	23.467	23.467	22.755	22.755	22.755	22.755	22.900	22.900	22.900
6	Daging Ayam Ras	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
7	Cabe Merah	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	60.000	60.000	70.000
8	Keriting	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	Bawang Merah	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Gula Pasir Lokal	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	Kedelai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Jagung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	Beras Termurah	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Beras Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beras Premium										

Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna (diolah)



Tabel II.21

Panel Harga Strategis HBKN (5 Hari Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru) Tahun 2017

No	Komoditi	Tanggal dan Harga / Kg				
		20 Des 2017	21 Des 2017	22 Des 2017	23 Des 2017	24 Des 2017
1	Kacang Tanah	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	Tepung Terigu	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Minyak Goreng	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	Daging Sapi Murni	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	Telur Ayam Ras	-	-	-	-	-
6	Daging Ayam Ras	35.000	35.000	38.000	38.000	35.000
7	Cabe Merah Keriting	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	Bawang Merah	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	Gula Pasir Lokal	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Kedelai	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Jagung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Beras Termurah	-	-	-	-	-
13	Beras Medium	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Beras Premium	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna (diolah)



Tabel II.22
Panel Harga Strategis HBKN (10 Hari Menjelang Idul Fitri) Tahun 2018

Komoditas	Data Harga Pangan / Kg dan Tanggal										Harga Jual (Rp/Kg)
	5-Jun-18	6-Jun-18	7-Jun-18	8-Jun-18	9-Jun-18	10-Jun-18	11-Jun-18	12-Jun-18	13-Jun-18	14-Jun-18	
Kacang Tanah	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Tepung Terigu	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Minyak Goreng	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Daging Sapi Murni	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
Telur Ayam Ras	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
Daging Ayam Ras	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Cabe Merah Keriting	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Cabe Rawit Merah	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Bawang Merah	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
Bawang Putih (bonggol)	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
Bawang Putih (kating)											-
Gula Pasir Lokal	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Kedelai	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
Jagung	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Beras Termurah	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667	13,667
Beras Medium	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Beras Premium											-



Tabel II.22

Panel Harga Strategis HBKN (5 Hari Menjelang Idul Adha) Tahun 2018

Komoditas	Data Harga Pangan / Kg dan Tanggal					Harga Jual (Rp/Kg)
	17-Aug-18	18-Aug-18	19-Aug-18	20-Aug-18	21-Aug-18	
Kacang Tanah	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Tepung Terigu	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Minyak Goreng	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Daging Sapi Murni	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
Telur Ayam Ras	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
Daging Ayam Ras	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Cabe Merah Keriting	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
Cabe Rawit Merah	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
Bawang Merah	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Bawang Putih (bonggol)	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Bawang Putih (kating)						-
Gula Pasir Lokal	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Kedelai	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
Jagung	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Beras Termurah	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Beras Medium	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Beras Premium						-



Tabel II.22
Panel Harga Strategis HBKN (5 Hari Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru) Tahun 2018

Komoditas	Data Harga Pangan / Kg dan Tanggal					Harga Jual (Rp/Kg)
	20-Dec-18	21-Dec-18	22-Dec-18	23-Dec-18	24-Dec-18	
Kacang Tanah	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Tepung Terigu	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Minyak Goreng	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
Daging Sapi Murni	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
Telur Ayam Ras	-	-	-	-	-	-
Daging Ayam Ras	35,000	35,000	38,000	38,000	35,000	36,200
Cabe Merah Keriting	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
Bawang Merah	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
Gula Pasir Lokal	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Kedelai	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Jagung	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Beras Termurah	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Beras Medium	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Beras Premium	-	-	-	-	-	-



Tabel II.22
Panel Harga Strategis HBKN (10 Hari Menjelang Idul Fitri) Tahun 2019

Komoditas	Data Harga Pangan / Kg dan Tanggal										Harga Jual (Rp/Kg)
	3-Jun-19	4-Jun-19	5-Jun-19	6-Jun-19	7-Jun-19	8-Jun-19	9-Jun-19	10-Jun-19	11-Jun-19	12-Jun-19	
Kacang Tanah	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Tepung Terigu	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Minyak Goreng	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Daging Sapi Murni	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
Telur Ayam Ras	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
Daging Ayam Ras	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
Cabe Merah Keriting	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
Cabe Rawit Merah	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
Bawang Merah	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
Bawang Putih (bonggol)	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
Bawang Putih (kating)											-
Gula Pasir Lokal	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Kedelai	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Jagung											-
Beras Termurah	12,667	12,667	12,667	12,667	12,667	12,667	12,667	12,667	12,667	12,667	12,667
Beras Medium	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
Beras Premium											-



Tabel II.22

Panel Harga Strategis HBKN (5 Hari Menjelang Idul Adha) Tahun 2019

Komoditas	Data Harga Pangan / Kg dan Tanggal					Harga Jual (Rp/Kg)
	7-Aug-19	8-Aug-19	9-Aug-19	10-Aug-19	11-Aug-19	
Kacang Tanah	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Tepung Terigu	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Minyak Goreng	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Daging Sapi Murni	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
Telur Ayam Ras	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
Daging Ayam Ras	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Cabe Merah Keriting	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
Cabe Rawit Merah	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
Bawang Merah	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Bawang Putih (bonggol)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Bawang Putih (kating)						-
Gula Pasir Lokal	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Kedelai	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Jagung						-
Beras Termurah	12,667	12,667	12,667	12,667	12,667	12,667
Beras Medium	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
Beras Premium						-



Panel Harga Strategis HBKN (5 Hari Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru) Tahun 2019

Komoditas	DATA HARGA PANGAN 5 HARI MENJELANG HARI NATAL DAN TAHUN BARU TAHUN 2019					Harga Jual (Rp/Kg)
	20-Dec-19	21-Dec-19	22-Dec-19	23-Dec-19	24-Dec-19	
Kacang Tanah	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Tepung Terigu	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Minyak Goreng	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Daging Sapi Murni	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
Telur Ayam Ras	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
Daging Ayam Ras	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
Cabe Merah Keriting	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
Cabe Rawit Merah	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
Bawang Merah	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Bawang Putih (bonggol)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Bawang Putih (kating)						-
Gula Pasir Lokal	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Kedelai	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Jagung						-
Beras Termurah	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
Beras Medium	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
Beras Premium						-



2.3.2. Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pola konsumsi masyarakat Kabupaten Natuna pada umumnya masih tergantung pada satu komoditi yaitu beras sebagai sumber karbohidratnya. Akibatnya konsumsi beras melebihi angka anjuran sebaliknya konsumsi sumber karbohidrat dan protein dari sumber pangan lain masih rendah.

Keberhasilan sasaran diukur melalui indikator yaitu kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman yang ditunjukkan dengan peningkatan skor PPH.FAO-RAPA yang mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.

Diversifikasi pangan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan yang sangat tinggi pada jenis pangan tertentu saja seperti beras. Pencapaian konsumsi pangan di Kabupaten Natuna tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

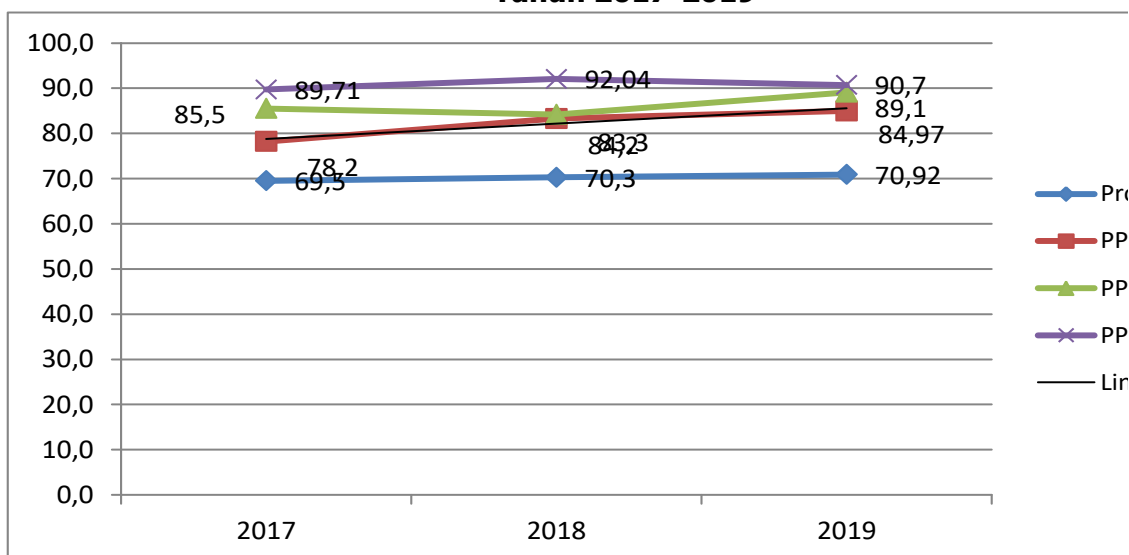
Tabel II.22
Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan Protein serta Skor PPH
Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Energi (kkal/kap/hr)	Protein (gr/kap/hr)	PPH Natuna	PPH Kepri	PPH Nasional
1.	2017	2371,4	69,5	78,2	85,5	89,71
2.	2018	2267,73	70,3	83,3	84,2	92,04
3.	2019	2425,96	70,92	84,97	89,1	90,7
4	2020	2238,21		85,15		
5	2021	2269	69,9	82,43	85,4	86,3

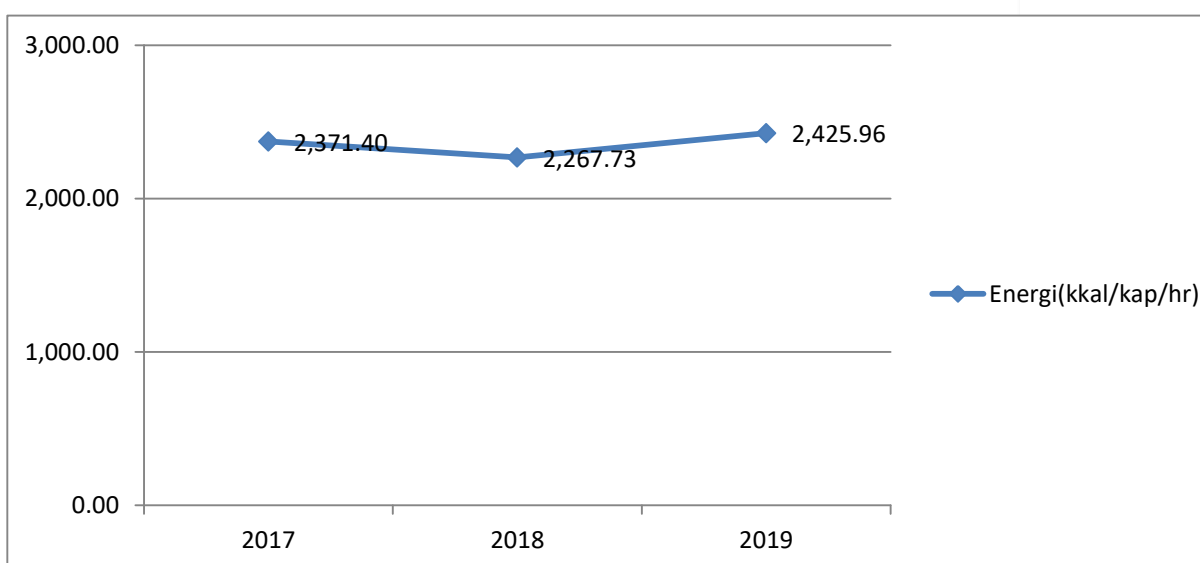
Sumber : Susenas 2017 – 2020, BPS , diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan



Grafik II.3 Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2017-2019



Grafik II.4 Perkembangan Konsumsi Pangan Energi Tahun 2016-2018



Secara keseluruhan kualitas/keragaman konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor PPH mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2017-2019 dari sebesar 78,2 pada tahun 2017 menjadi 84,97 pada tahun 2019. Kualitas konsumsi rata-rata penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2019 skor PPH sebesar 84,97, angka ini masih dibawah target provinsi sebesar 89,1 dan nasional sebesar 90,7. Namun demikian, rata-rata pola konsumsi masyarakat terhadap kelompok pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta gula melebihi konsumsi ideal yang telah ditetapkan. Sedangkan kelompok pangan yang masih



rendah dari konsumsi ideal yang ditetapkan adalah kelompok umbi-umbian, kacang-kacangan, serta buah/biji berminyak.

Adapun beberapa kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi di Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Lomba Cipta Menu yang Berbasis Pangan Lokal

Merupakan salah satu upaya dalam promosi kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Menu 3B disusun berdasarkan menu terbaru yaitu Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

Adapun prestasi dan penghargaan yang telah di capai oleh Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna dari Tahun 2010 – 2019 antara lain :

1. Tahun 2010 : Juara III pada Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Kepri;
2. Tahun 2014 : Pemenang kategori Pemanfaatan Pangan Lokal pada Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Kepri dan Juara Favorit pada Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Kepri;
3. Tahun 2017 : Juara I pada Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi Kepri dan mewakili Provinsi Kepri pada hari pangan sedunia di Kalimantan Barat;
4. Tahun 2018 : Juara Favorit pada Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi Kepri;
5. Tahun 2019 : Juara I Lomba Cipta Menu B2SA pada Festival Pangan Lokal B2SA Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, Juara II pada Lomba Hari Pangan Sedunia (HPS) di kendari dan Juara I Lomba Stand Pameran dalam Rangka HUT Natuna.

b. Penyuluhan Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)

Kegiatan ini baru dilakukan pada kelompok-kelompok binaan dalam kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan permintaan dari masyarakat dan instansi, seperti ibu-ibu PKK dan Kelompok Wanita Tani (KMT).

c. Pembinaan/Penyuluhan pada Kelompok Binaan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Kegiatan KRPL merupakan salah satu dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan memanfaatkan sumber daya setempat atau lingkungan sekitar. Kegiatan ini berupa : pemanfaatan pekarangan, pengembangan bibit kelompok, pengembangan lahan pekarangan sekolah dan penyuluhan akan konsumsi pangan atau lainnya.



Tabel II.23
Data Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2013-2019 ganti tabel dari paparan

Desa / Kelurahan	Nama Kelompok	Tahun	Sumber Dana
Bandarsyah	Indah Lestari	2013	APBN
Kelanga	Pelita Hati	2013	APBN
Tanjung	Bunga Desa	2013	APBN
Limau Manis	Bakhti Bersama	2013	APBN
Tapau	Sekar Jaya	2013	APBN
Air Lengit	Rosella	2013	APBN
Cemaga Tengah	Rimbunan Hijau	2017	APBD
Sededap	Kebun Lestari	2017	APBD
Ranai	Cassava	2017	APBN
Ranai Darat	Perempuan Lestari	2017	APBN
Cemaga Utara	Cemara Desa	2017	APBN
Cemaga	Sinar Baru	2017	APBN
Teluk Buton	Teratai	2017	APBN
Setumuk	Mekar Serumpun	2018	APBN
Pian Tengah	Setia kawan	2018	APBN
Batubi Jaya	Sinar Anggrek Jaya	2018	APBN
Gunung Putri	Sumber Rezeki	2018	APBN

DATA KELOMPOK TAHAP PENUMBUHAN KEGIATAN KRPL TA. 2019

Desa / Kelurahan	Nama Kelompok	Tahun	Sumber Dana
Mekar Jaya	Kwt Mekar Lestari	2019	APBN
Selaut	Kwt Selaut	2019	APBN
Sungai Ulu	Kwt Pangan Berkembang	2019	APBN
Batu Gajah	Kwt Hati Kami	2019	APBN
Serantas	Kwt Sejahtera	2019	APBN
Kelarik Utara	Kwt Bina Bersama	2019	APBN
Pengadah	Kwt Tuntas Baru	2019	APBD
Harapan Jaya	Kwt Jaya Lestari	2019	APBD
Sedarat Baru	Kwt Mawar Putih	2019	APBN
Semedang	Kwt Kamboja	2019	APBN



DATA KELOMPOK TAHAP PENGEMBANGAN KEGIATAN KRPL TA. 2020

Desa / Kelurahan	Nama Kelompok	Tahun	Sumber Dana
Mekar Jaya	Kwt Mekar Lestari	2020	APBN
Selaut	Kwt Selaut	2020	APBN
Sungai Ulu	Kwt Pangan Berkembang	2020	APBN
Batu Gajah	Kwt Hati Kami	2020	APBN
Serantas	Kwt Sejahtera	2020	APBN
Kelarik Utara	Kwt Bina Bersama	2020	APBN
Pengadah	Kwt Tuntas Baru	2020	APBD
Harapan Jaya	Kwt Jaya Lestari	2020	APBD
Sedarat Baru	Kwt Mawar Putih	2020	APBN
Semedang	Kwt Kamboja	2020	APBN

Sumber : Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna

d. Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pengambilan sampel di Beberapa kecamatan terhadap Pangan segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar (Post market) di sejumlah Pasar maupun Warung/Kios di Kabupaten Natuna. Pengambilan sampel dan pengujian dengan test kit tersebut hanya boleh dilakukan oleh PPC (Petugas Pengambil Contoh) yang sudah bersertifikat (sudah lulus dalam uji kompetensi PPC).

2.2.1 Bidang Pertanian

Dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna telah melakukan berbagai upaya pembangunan khususnya di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kelembagaan dan penyuluh melalui berbagai program dan kegiatan internal, maupun yang memfasilitasi masukan, saran dan kritik dari masyarakat. Indikasi Pencapaian Kinerja Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :



Tabel 2.3.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna tahun 2016 – 2020.

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Produksi tanaman pangan (Padi Sawah)			343,3	386,6	429,9	473,2	300	232	301,40	258,30	345,85		67,58	77,96	60,08	73,09
2.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB (dengan migas)			10,70	11,10	11,5	12,00	10,30	24,50	23,33	22,09	22,63		228,97	210,18	192,00	188,58
3.	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB			0,04	0,04	0,04	0,04	1,22	1,22	1,23	1,24	1,25		305,00	307,50	310,00	312,50
4.	Kontribusi sektor perkebunan tahunan terhadap PDRB			2,28	2,33	2,39	2,44	81,95	81,95	81,5	80,71	80,48		359,43	349,78	337,69	329,83
5.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB			0,50	0,50	0,50	0,50	3,07	3,07	2,89	3,07	2,95		614,00	578,00	614,00	590,00
6.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB			1,70	1,80	1,90	2,00	12,02	12,02	12,69	13,28	13,56		707,06	705,00	698,95	678,00
7.	Cakupan bina kelompok petani			8	8	9	9	7	8,3	8,3	10	11,67		103,75	103,75	111,11	129,67
8.	Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi lapangan			100	100	100	100	4,23	4,23	72,27	-28,49	344,81,75		4,23	4,23	72,27	344,81,75
9.	Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas			100	100	100	100	0,06	0,06	0,07	0,08	0,07		0,01	0,01	0,01	0,01
10.	Peningkatan pendapatan petani kebun (capaian rata-rata)			700 - 1100	800 - 1100	900 - 1200	900 - 1200	1200	1200	1500	1600	1900		120	136,36	145,45	158,33
11.	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (Jumlah tenaga kerja baru/tahun)			72	74	76	78	70	72	74	76	78		100	100	100	100
12.	Peningkatan pertumbuhan sub sektor perkebunan			2,07	2,31	2,54	2,77	1,84	4,34	46	0,4	8,29		209,66	199,134	15,75	299,28
13.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		25	32	36	40	50	25	30	35	40	50	100	93,75	97,22	100	100
14.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular							13,23	14,23	15,23	16,23	17,23					

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna dari tahun 2016 – 2020, sebanyak delapan indikator kinerja menunjukkan pencapaian target yang sangat baik, indikator tersebut antara lain Kontribusi sektor pertanian,



kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB (dengan migas), Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB, Kontribusi sektor perkebunan tahunan terhadap PDRB, Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB, Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB, Cakupan bina kelompok petani, Peningkatan pendapatan petani kebun (capaian rata-rata), dan Peningkatan pertumbuhan sub sektor perkebunan.

Faktor – faktor pendukung tercapainya target indikator kinerja tersebut antara lain bertambahnya cakupan luas tanaman produktif, baik tanaman pangan (selain padi), hortikultura maupun tanaman perkebunan.

Namun demikian terdapat beberapa target indikator kinerja yang tidak tercapai, indikator tersebut antara lain adalah Produksi tanaman pangan (Padi Sawah), Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi Lapangan, Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas, dan Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (Jumlah tenaga kerja baru/tahun).

Faktor – faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja tersebut antara lain realisasi luas tanam tidak tercapai akibat tidak adanya kegiatan pencetakan lahan sawah dari tahun 2017 – 2020, kurangnya sarana produksi terutama ketersediaan pupuk dan obat – obatan tanaman, rendahnya harga jual komoditas perkebunan sehingga membuat gairah petani untuk berkebun berkurang yang pada akhirnya menyebabkan perawatan dan pemeliharaan kebunnya tidak maksimal, Kurangnya dukungan anggaran dalam peningkatan keterampilan SDM perkebunan, tidak adanya data administrasi tenaga kerja sektor perkebunan disebabkan tidak adanya badan usaha sektor perkebunan sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap tidak terdata.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna dari sisi Aspek Daya Saing Daerah Daya saing, tergambar dari capaian tingkat kesejahteraan petani yang diukur dengan Nilai Tukar Petani. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.

Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. NTP



mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Bila $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Nilai Tukar Petani Kabupaten Natuna pada tahun 2016 adalah 100, ini artinya impas. Indeks harga yang diterima petani sama besar dengan indeks harga yang dikeluarkan petani. Nilai ini menurun menjadi 92,75, ini artinya petani merugi. Pada tahun 2020 Nilai tukar petani Kabupaten Natuna mencapai 104,2. Ini menggambarkan bahwa petani sudah mulai sejahtera.

Selain pemenuhan pencapaian indikator kinerja pelayanan, kinerja pelayanan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi selama lima tahun terakhir diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pendataan mengenai Luas Tanam, Luas Panen tanaman dan produksi Pangan dan hortikultura.

Tabel 2.3.2.2 Luas Lahan Sawah Berdasarkan SID Sawah Kabupaten Natuna Tahun 2015, 2016, 2017

No.	Kecamatan	Luas Potensi Lahan Sawah	Luas Lahan Sawah dibuka	Luas Lahan Sawah Produktif
1.	Kec. Batubi	744.85	339.88	153.35
2.	Kec. Bung. Tengah	81.48	81.48	38.46
3.	Kec. Bung. Timur	6.79	6.79	0
4.	Kec. Bung. Utara	707.6	81.48	68.68
5.	Kec. Serasan Timur	106.37	106.37	0
6.	Kec. Subi	15.31	15.31	0
TOTAL		1662.41	631.31	260.49



Tabel 2.3.2.3 Areal dan Produksi Tanaman Pangan (Padi) dan Hortikultura Tahun 2016 – 2020

NO	Komoditi	Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020			
		Luas Areal (Ha)			Prod (Ton)	Luas Areal (Ha)			Prod (Ton)	Luas Areal (Ha)			Prod (Ton)	Luas Areal (Ha)			Prod (Ton)	Luas Areal (Ha)			Prod (Ton)
		Tanam	Panen	Pus o		Tanam	Panen	Pus o		Tanam	Panen	Pus o									
1	Padi	188.4	145.6		317	134,75	107		231,83	120	112,5	25,5	301,4	152.65	93.75	32.00	258.30	114.13	137.28	7.35	345.85
2	Jagung	57.45	58.95		125	67,75	52.45		122	61,74	55,45	0,2	138,55	62.00	44.44	6.78	147.83	95.55	73.25	3.65	341.14
3	Ubi Kayu	88,4	85.85		1.073	106,9	100		1.333	116,25	116,25	-	1.842,5	80.40	76.00	4.01	704.79	83.50	85.10	1.00	858.23
4	Ubi Jalar	36	36.25		335	12,75	5,5		297.4	48,4	36,6	-	347,4	49.15	42.56	1.81	215.70	48.00	38.60	3.10	190.84
5	Kacang Tanah	7.2	6.2		9	2,26	17		9.8	5,2	5,5	-	9,74	3.20	3.30	0.60	5.97	12.65	9.85	0.60	21.38
6	Bawang Daun													2.8	2.25	0.55	22.5	6.88	5.15	0.75	63.81
7	Sawi / Persai	51.45	63.16		64,7	37.15	33.60		38.50					8.2	7.1	1.1	61.1	19.04	16.67	0.4	99.53
8	Kacang Panjang	43.05	40.2		39.15	41.35	39.7		29.00					20.3	18.15	2.15	201.5	46.99	44.7	0.1	351



9	Cabe Besar													20.3	18.15	2.15	201.5	32.27	28.77	1.1	174.87
10	Cabe Rawit	51.45	63.16		64,7	37.15	33.60		38.50					25.01	16.11	6.85	138.67	76.97	73.19	2.2	355.27
11	Tomat													1.4	1.4	0	6.7	6.95	5	1.75	38
12	Terung	27.04	25.34		24.97	26.29	26.29		26.30					12.85	10.55	2.8	97.9	38.62	38.57	0.1	380.6
13	Buncis													1.95	1.95	0	28.25	5.12	5.12	0	12.65
14	Ketimun	46.4	90.8		72.3	37.66	2.25		67.10					23.9	24.2	0.3	105	52.5	51.45	1	520.45
15	Kangkung	59.3	69.3		51.95	59.57	40.74		57.60					39.4	39.4	0	275.8	66.66	61.8	0.85	278
16	Bayam	38	34.45		80.05	40.74	38.09		77.00					27.95	27.95	0	195.65	48.45	45.4	1.2	242.19
17	Semangka													30.16	23.01	7.15	168.08	42.65	36.65	40.1	649.5



b. Pendataan mengenai Luas Tanam, Luas Panen tanaman dan produksi Tanaman Perkebunan.

Tabel 2.3.2.4 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2017-2021

NO	Komoditi	Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021			
		Luas Areal (Ha)			Prod uksi (Ton)	Luas Areal (Ha)			Prod uksi (Ton)	Luas Areal (Ha)			Prod uksi (Ton)	Luas Areal (Ha)			Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)			Produksi (Ton)
		TB M	T M	TT M		TB M	TM	TTM		TBM	TM	TTM		TBM	TM	TTM		TB M	T M	TT M	
1	Cengkeh									1.325	8.626	2.170		1,476.50	9,425.10	2,350.50	17,307.70				
2	Kelapa																				
3	Karet									434	2.968	834	946	442.00	2.992.50	833.75	4.318.50				



c. Pendataan mengenai Populasi Ternak.

Tabel. 5.45 Populasi ternak besar tahun 2017-2021

NO.	KECAMATAN	SAPI POTONG						KAMBING					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	MIDAI				712	662	672				191	165	157
2	SUAK MIDAI				500	490	497				216	188	179
3	BUNGURAN BARAT				447	471	478				130	128	122
4	BUNGURAN UTARA				751	833	845				15	9	9
5	PULAU LAUT				628	644	654				26	13	12
6	PULAU TIGA				33	31	31				32	15	14
7	BUNGURAN BATUBI				605	780	792				204	145	138
8	PULAU TIGA BARAT				12	16	16				25	13	12
9	BUNGURAN TIMUR				1.803	1.375	1.396				70	40	20
10	BUNGURAN TIMUR LAUT				887	831	843				8	-	
11	BUNGURAN TENGAH				1.524	1.656	1.681				30	10	9
12	BUNGURAN SELATAN				1.486	1.621	1.645				10	-	
13	SERASAN				85	73	74				30	19	18
14	SUBI				386	417	423				60	46	44
15	SERASAN TIMUR				138	149	151				325	295	280
NATUNA					9.997	10.049	10.198				1.372	1.086	1.014



Tabel. 5.45 Populasi ternak kecil tahun 2017-2021

NO.	KECAMATAN	AYAM KAMPUNG						AYAM PEDAGING						ITIK / ITIK MANILA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	MIDAI				8.840	7.690	2.018				-	-	-				29	31	23
2	SUAK MIDAI				10.595	9.243	2.346				-	-	-				12	17	9
3	BUNGURAN BARAT				4.494	3.914	1.030				30.000	15.300	15				167	170	162
4	BUNGURAN UTARA				2.158	1.878	545				-	-	-				47	43	103
5	PULAU LAUT				569	495	230				-	-	-				39	42	35
6	PULAU TIGA				1.204	1.047	275				-	-	-				70	64	34
7	BUNGURAN BATUBI				5.388	4.688	1.124				6.000	295	2.300				314	111	56
8	PULAU TIGA BARAT				1.006	875	205				-	-	-				120	118	110
9	BUNGURAN TIMUR				7.912	6.883	2.349				144.000	118.000	178.000				748	655	647
10	BUNGURAN TIMUR LAUT				7.634	6.641	1.593				36.000	7.400	8.700				55	29	21
11	BUNGURAN TENGAH				6.731	5.856	1.603				109.500	91.750	1.700				520	435	427
12	BUNGURAN SELATAN				7.861	6.839	1.670				193.000	153.050	151.000				50	43	35
13	SERASAN				1.162	1.011	238				-	-	-				295	87	79
14	SUBI				3.611	3.141	694				-	-	-				45	48	40
15	SERASAN TIMUR				6.584	5.728	1.420				36.000	19.000	19.000				594	575	567
	NATUNA				75.749	65.929	17.340				554.500	404.795	360.715				3.105	2.468	2.348



Tabel II.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bidang Ketahanan Pangan Sumber Dana APBD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Urusan Wajib (Pangan)	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-	
Belanja	-	--	-			-	-	-			-	-	-	-	
Belanja Langsung	-	4.472.155.800	-			-	-	-			-	-	-	-	
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	-	1.031.049.000	749.503.850	513.960.000	187.179.000	-	933.709.289	607.790.832	457.066.853	35.894.400	-	-	-	-	
Lomba Cipta Menu 3B (Bergizi, Beragam, Berimbang)	-		-			-	-	-			-	-	-		
Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	-	401.253.000	278.135.200	259.295.000	64.901.000	-	351.650.600	238.873.403	216.584.783	11.430.000	-	87,64	85,88	85,53	
Sosialisasi penganeekaragaman konsumsi pangan dan promosi	-	343.269.000	286.437.950	-	-	-	308.025.489	243.103.783	-		-	-	84,87	-	
Pengembangan Kawasan Pangan Lestari (KRPL)	-	286.527.000	91.361.000	163.514.000	50.065.000	-	274.033.200	62.847.443	159.971.070	22.781.400	-	95,64	68,79	97,83	
Peningkatan Pengawasan Pangan Segar	-		93.569.700	91.151.000	72.213.000	-		62.966.203	80.511.000	1.683.000	-	-	67,29	-	
Program peningkatan ketahanan pangan	-	628.783.000	260.423.850	158.502.000	30.500.000	-	599.310.468	176.941.150	131.818.000	599.310	-	-	67,94	83,16	



Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan koordinasi dewan ketahanan pangan	-	628.783.000	260.423.850	158.502.000	30.500.000	-	599.310.468	176.941.150	131.818.000	599.3109	-	95,31	67,94	83,16	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	250.500.000	-	-			225.587.400	-	-			90,05	-	-		
Pengembangan Lumbung Pangan Desa	-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Program penanganan daerah rawan pangan	-	1.023.621.800	638.981.700	755.482.328	603.399.920	-	886.313.939	459.297.371	688.287.197	556.061.255			71,88	91,11	92,15
Analisis perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan	-	167.045.000	103.798.000	69.204.000	3.555.000	-	155.174.600	89.249.471	68.574.120	3.548.000	-	92,89	85,98	99,09	99,80
Analisis dan perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan	-	155.230.000	173.991.000	89.925.328	83.120.000	-	124.824.900	169.571.000	86.225.490	78.485.940	-	80,41	97,46	95,89	94,42
Pengembangan distribusi, cadangan dan penanganan rawan pangan	-	315.211.800	161.222.000	314.054.000	366.616.920	-	250.817.500	64.128.200	259.152.100	335.989.920	-	79,57	39,78	82,52	91,65
Pengembangan lumbung pangan masyarakat	-	177.665.000	99.047.000	171.335.000	117.987.000	-	158.180.750	49.319.600	164.571.000	105.939.995	-	89,03	49,79	96,05	89,79
Pembinaan usaha produktif rumah tangga miskin	-	208.470.000	100.923.700	110.964.000	32.121.000	-	197.316.189	87.029.100	109.764.487	32.097.400	-	94,65	86,23	98,92	99,93
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	-	33.700.000	66.000.000	53.712.000		-	28.437.112	59.173.112	47.094.604		-	84,38	89,	87.	



dan Keuangan													66	68	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	-	33.700.000	66.000.000	53.712.000		-	28.437.112	59.173.112	47.094.604		-	84,38	89,66	87,68	



Tabel II.25

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bidang Ketahanan Pangan Sumber Dana APBN Tahun 2017-2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	127.000.000	-	65.000.000	106.000.000	-	65.000.000	83,46 %	-	
1. Fasilitasi KRPL	96.000.000	-	-	75.000.000	-	-	78,95 %	-	
2. Pendampingan	31.000.000	-	-	31.000.000	-	-	100 %	-	
Pengembangan Sistem Distribusi Pangan	-	8.000.000	-	-	8.000.000	-	-	100 %	
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan / Pemberdayaan Pekarangan Pangan	-	238.100.000	842.000.000	-	237.657.600	783.900.000	-	92 %	93.10 %
Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	-	-	50.000.000	-	-	26,573,000	-	-	53.15 %
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	-	17.000.000	75.500.000	-		72,050,000	-	99,45 %	95.43 %



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Aspek pembangunan ketahanan pangan yang mencakup subsistem ketersediaan dan kerawanan pangan, sub sistem distribusi pangan, subsistem konsumsi dan keamanan pangan cukup luas dan terkait dengan berbagai sektor serta sub sektor, sehingga memerlukan kebijakan yang terkoordinasi mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.
2. Program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena jumlah SDM yang tersedia cukup terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya menjadikan tantangan dalam penyediaan pangan bagi penduduk, baik dari hasil produksi maupun penyediaan pasokan pangan dari luar daerah.
4. Peningkatan produksi pangan terkendala karena potensi sumber daya alam belum dikelola secara optimal, perubahan iklim dan cuaca, dan jumlah petani yang semakin berkurang yang terutama disebabkan minimnya minat generasi muda untuk menjadi petani.
5. Ketergantungan pasokan pangan yang tinggi dari luar daerah dan luar negeri dapat menyebabkan instabilitas harga pangan apabila terjadi gejolak harga pangan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Pengaruh nilai-nilai budaya dan kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
7. Kondisi iklim yang kurang baik dapat mengganggu ketersediaan bahan makanan yang menyebabkan kerawanan pangan masyarakat, khususnya pada pulau-pulau yang sulit dijangkau (minim akses transportasi);
8. Masih kurangnya pengawasan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.



2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kebijakan pengembangan cadangan pangan masyarakat;
2. Adanya pengembangan sistem distribusi pangan yang efisien dengan meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan;
3. Tersedianya lahan pekarangan masyarakat yang belum dikelola secara optimal untuk penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal;
4. Teknologi pertanian yang semakin baik memberikan peluang dalam peningkatan produksi, sehingga dapat memenuhi ketersediaan bahan makanan bagi masyarakat;
5. Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui sumber dana dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten.



III.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal penentuan kebijakan yang akan diambil. Melalui analisis permasalahan pembangunan, pemerintah daerah dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sebagai bahan untuk kemudian mendalami akar masalah permasalahan pada masing-masing bidang urusan pembangunan daerah. Alhasil, jika poin-poin inti dari permasalahan pembangunan dapat ditemukan secara relevan maka program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan akan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan. Melalui penajaman permasalahan yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal maupun internal, Pemerintah Kabupaten Natuna dapat memberi prediksi berbagai peluang ataupun prediksi ancaman bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan tersebut harus dirumuskan dengan tepat sebagai bagian dari identifikasi awal penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Natuna. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pembangunan lima tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh faktor produksi saja, namun juga berkaitan dengan pembangunan lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Proses pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian sesuai dengan lingkup



tugasnya sesuai dengan arah kebijakan yang berada di atasnya dengan tetap mengedepankan prinsip *clean government* dan *good governance*.

Permasalahan pokok dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari sisi ketahanan pangan adalah *masih rentannya kerawanan pangan masyarakat*. Situasi kerawanan pangan masih rentan di Kabupaten Natuna dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan dan pengaruh cuaca yang cenderung ekstrim pada saat-saat tertentu. Berdasarkan Indeks Komposit SKPG Ketahanan Pangan kabupaten Natuna bulan Desember tahun 2016, dari sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Natuna, ada 7 kecamatan teridentifikasi rawan pangan, 1 kecamatan teridentifikasi aman dan 4 kecamatan lainnya tidak terbaca kompositnya, dikarenakan ada salah satu aspek tidak lengkap datanya selama 3 bulan berturut-turut.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya yaitu tahun 2011-2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Natuna sebagai berikut :

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pembangunan ketahanan pangan wilayah	Masih kurangnya fungsi dewan ketahanan pangan
	Belum optimalnya distribusi pasokan pangan
	Masih tingginya tingkat ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah
	Belum optimalnya sistem ketahanan pangan
	Masih rendahnya sarana dan prasarana ketahanan pangan
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang panganekaragaman konsumsi pangan
	Belum terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar
	Belum maksimalnya penanganan daerah rawan pangan

sipembangunan pertanian, rendahnya produktifitas menjadi permasalahan dalam upaya peningkatan produksi pertanian. Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya yaitu tahun 2016-2020. Faktor - faktor penghambat rendahnya produktifitas tersebut antara lain adalah :



1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan;
2. Masih kurangnya pelayanan pengobatan dan pencegahan penyakit ternak;
3. Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan kelompok petani

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026, visi Kabupaten Natuna adalah ***"TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG UNGGUL, EKSOTIS, AMAN, DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERLANDASKAN NILAI RELIGIUS DAN KULTURA"*** Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Natuna maka dirumuskan 7 misi pembangunan untuk mengintegrasikan seluruh komponen penyelenggaraan pemerintahan yaitu :

1. Akselerasi peningkatan kualitas SDM
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (Smart Bureaucray)
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

Berdasarkan telaahan dari visi misi RPJMD Kabupaten Natuna 2021 – 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terletak pada Misi ke – 2 yaitu "Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal".



Misi ke dua ini menggambarkan sebuah kondisi pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan potensi unggulan daerah. Misi ini diwujudkan melalui peningkatan perekonomian di sektor perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, investasi yang sehat, usaha mikro dan koperasi.

Dalam mendukung misi ke-2 ini, yang menjadi tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri
2. Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan

Dalam upaya mewujudkan Misi ke-2 (dua) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib pangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1). Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
- 2). Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- 3). Program penanganan kerawanan pangan;
- 4). Program pengawasan keamanan pangan;
- 5). Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- 6). Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- 7). Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 8). Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- 9). Program penyuluhan pertanian;

Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa



mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Dampak langsung dari ketimpangan ini adalah terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan kerja, pendidikan, maupun berbagai modal lainnya.

Pengembangan dan pembangunan sektor pertanian merupakan konsep dasar yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Natuna. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Natuna. Pengembangan dan pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Pengembangan dan pembangunan pertanian khususnya komoditi tanaman pangan dan hortikultura di kawasan agropolitan difokusnya di Kec, Bunguran Batubi dan Kelarik, sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna.

Upaya pencapaian kemandirian ekonomi lokal tersebut ditempuh dengan beberapa arah kebijakan diantaranya adalah :

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan
- b. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan

3.3. Telaahan Renstra K/L

Sesuai tupoksinya, kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Kesehatan Hewan Propinsi Kepulauan Riau dan Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kepulauan Riau.



3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni : ***"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Untuk mendukung terwujudnya struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.



3.3.1.1 Tujuan

Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian

3.3.1.2 Sasaran

strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Sasaran Strategis dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja : peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri
2. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja : persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
3. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja : teknologi yang diterapkan oleh pertanian
4. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja : indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan dan. indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan
5. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja : persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani, persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis, persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)



6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja : persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani, persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian.

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Terdapat 4 (empat) faktor sebagai penggerak dalam pembangunan ekonomi, yaitu :

- (1). pengelolaan sumber daya alam secara optimal;
- (2). sumber daya manusia berkualitas;
- (3). teknologi maju dan
- (4). konsolidasi kelembagaan pertanian.

3.3.1.3 kebijakan

Adapun untuk **kebijakan** pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah yang didukung oleh pertanian diantaranya :

- a. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- b. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- c. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.

3.3.1.4 Strategi

Strategi yang dilakukan dalam mendukung kebijakan tersebut diantaranya :

1. Penggunaan air secara efisien terutama di sektor pertanian.
2. Peningkatan kinerja budidaya komoditas pertanian, pengembangan benih padi biofortifikasi dan produk rekayasa genetik, fortifikasi produk beras, pengembangan nanoteknologi produk pangan, pengembangan produk pangan lokal dan diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat, serta penyediaan dan perbaikan kualitas pangan untuk anak sekolah.



3.4. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Pembangunan Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapai pada zaman kesultanan Riau Lingga, dimana Kepulauan Riau dikenal menjadi sebagai salah satu pusat pemerintahan, pusat pengetahuan, perdagangan dan pusat peradaban Melayu. Hingga awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, Kepulauan Riau adalah daerah yang makmur. Pada masa itu Kepulauan Riau dikenang dengan "zaman dolar". Oleh sebab itu, maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu: "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya" Visi besar di atas akan diwujudkan dengan mengemban 5 (lima) misi, yakni :

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa
3. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2017-2037

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2037 sebagai bagian dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penataan Ruang Wilayah Kepulauan Riau bertujuan untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera melalui penataan ruang yang



optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan. Adapun kebijakan penataan ruang Kepulauan Riau dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pengembangan keterpaduan pusat-pusat kegiatan;
2. Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
3. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
4. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
5. Mengembangkan zona dan kawasan industri berdaya saing global;
6. Pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan, karimun; (pengembangan kawasan khusus);
7. Memelihara kelestarian wilayah kepulauan; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2. Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pangan dan pertanian sebagai berikut:

3.4.2.1. Urusan pangan

- a. Mewujudkan swasembada pangan daerah. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau berupa kepulauan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketergantungan pangan sehingga perlu meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi dan palawija. Pada tahun 2020 produksi padi menurun dari 1.150 ton pada tahun 2019 menjadi 852 ton pada tahun 2020.
- b. Peringkat Provinsi Kepulauan Riau pada Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2019 berada di posisi 28 dari 32 provinsi. Penyebab utamanya adalah rendahnya Indeks Ketersediaan Pangan yang diukur melalui indikator rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita. Hal ini dikarenakan Provinsi Kepulauan Riau bukan merupakan daerah penghasil atau produksi beras sebagai bahan makanan pokok. Kebutuhan bahan pangan sangat tergantung pada supply pangan dari wilayah lain
- c. Adanya potensi pengembangan tanaman pangan terbatas yang tidak mencapai target sebesar 300 ha. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan



dan pengolahan lahan sawah karena keterbatasan modal petani. Pada Tahun 2020, luas lahan panen padi adalah seluas 298,52 ha sehingga masih sekitar 1.095,48 ha yang belum diolah secara maksimal oleh petani berdasarkan Penetapan Luas Baku Lahan Sawah Nasional Tahun 2019 yaitu sebesar 1.394 ha.

- d. Perlunya peningkatan pada Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat. Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat meningkat dari 57,31% pada tahun 2019 menjadi 67,18% pada tahun 2020. Namun, hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan kembali karena perlindungan terhadap konsumen perlu dimaksimalkan sehingga swasembada pangan yg aman dan sehat semakin terwujud.

3.4.2.2. Urusan Pertanian

Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanian adalah pertumbuhan negatif untuk pertanian dan tanaman pangan sebesar -0,7 untuk pertanian dan -10,31 untuk tanaman pangan pada tahun 2020. Secara khusus, permasalahan pada urusan pertanian adalah :

- a. Diperlukan peningkatan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan. Hal ini disebabkan karena untuk menunjang peningkatan produksi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) diperlukan jaringan irigasi, jalan usaha tani, bangunan pengolahan hasil.
- b. Diperlukan pendampingan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini diperlukan untuk mempromosikan dan memasarkan hasil-hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) agar komoditas yang dihasilkan dapat ditampung oleh pedagang besar/ pengumpul/pasar dengan harga yang tidak merugikan petani.
- c. Diperlukan peningkatan kapasitas petani dan pelaku perkebunan. Hal ini disebabkan karena tantangan pembangunan pada urusan pertanian saat ini menuntut SDM yang cakap, sehingga bisa menghasilkan produk-produk pertanian dan perkebunan yang memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan pasar domestik maupun luar. Untuk itu, diperlukan kegiatan untuk peningkatan



SDM petani dan pelaku perkebunan seperti diselenggarakannya kegiatan pelatihan, diklat dan rutin.

- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi untuk pertanian, perkebunan dan peternakan. Pemanfaatan teknologi tersebut antara lain adalah dukungan teknologi agar produk hortikultura bertahan lama.
- e. Belum optimalnya keberlanjutan produksi pertanian dan perikanan. Keberlanjutan ini harus melibatkan kearifan lokal. Fungsi kearifan lokal antara lain adalah untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan tidak merusak tanah pertanian
- f. Diperlukan pendirian BUMD pertanian. Hal ini disebabkan karena untuk meningkatkan nilai ekonomi produksi pertanian lokal baik melalui penguatan modal pola kemitraan, perbaikan tata niaga pertanian dan stabilisasi harga yang berpihak pada petani maka diperlukan BUMD yang mengampu urusan tersebut.
- g. Belum optimalnya penyuluh yang meningkat kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya yaitu masih sebesar 37,28% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena peningkatan kapasitas atau kompetensi di bidang keahliannya dengan pemberian pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan sekolah lapang kepada 15 orang dari 41 orang penyuluh pertanian seProvinsi Kepulauan Riau.
- h. Diperlukan diversifikasi komoditas dan produk pertanian untuk pasar domestik dan ekspor. Hal ini selaras dengan RPJPD 2005-2025 belum tercapai dengan baik. Hal ini disebabkan karena diversifikasi merupakan upaya meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Diversifikasi tanaman dapat dilakukan dengan cara diversifikasi tanaman dengan pergantian jenis tanaman.
- i. Belum optimalnya Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar yaitu 0,021 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan terbatasnya ketersediaan obat-obatan hewan serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengendalian penyakit hewan.

3.4.2.3. Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 sebagai berikut:



Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah produktif yang merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dengan satuan luasan hektar. Luasannya adalah 226.451 ha. Hal ini merupakan salah satu keunggulan wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau yang dapat menunjang sektor perekonomian.

3.4.3. Visi dan Misi

Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu: **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”** Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut: **Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera. **Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional. **Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu: Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat. Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau



3.4.3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan indikasi kinerja pembangunan yang diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dari hasil pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 adalah sebagai berikut :

“Misi : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat”

“Tujuan : Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi”

“Sasaran : Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)”

Strategi : 1. Pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah.
2. Bantuan permodalan bagi para pelaku usaha sektor pertanian.

3.4.3.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan Daerah merupakan program strategis Daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Pemerintahan Daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Identifikasi program pembangunan daerah, dilakukan dengan cara menganalisis tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan, kemudian dijabarkan program pembangunan Daerah sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan demikian akan terlihat alur



keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dengan program pembangunan daerah. Berikut ini adalah daftar program pembangunan Daerah yang mendukung secara langsung dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Program pembangunan tersebut dikelompokkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan "Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat". Program pembangunan Daerah pada misi ini ialah:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyuluhan Pertanian;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
6. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
7. Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

3.5. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011-2031

3.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031. Tujuan dari penataan ruang wilayah ini adalah ingin mewujudkan Natuna sebagai gerbang utara NKRI yang bermartabat dan mandiri ekonomi berbasis migas dan agrominawisata yang berkelanjutan dan lestari. Beberapa kebijakan penataan ruang wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Natuna ini meliputi :

- a. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- b. Peningkatan fungsi kawasan mengantisipasi peluang pengembangan perdagangan bebas;



- c. Pemerataan pertumbuhan wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Pengembangan sektor ekonomi basis yang bertumpu pada sektor migas, sumber daya bahari, perkebunan dan pertanian;
- e. Pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah;
- f. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh wilayah sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya;
- g. Pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- h. Percepatan pengembangan wilayah kabupaten; dan
- i. Pengembangan sistem sarana dan prasarana permukiman memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat.

Dalam RTRW Kabupaten Natuna ini, telah ditetapkan kawasan strategis yang meliputi kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten merupakan pulau - pulau terluar meliputi Pulau Subi Kecil, Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Tokong Boro, Pulau Senua, dan Pulau Kepala. Sedangkan Kawasan strategis Provinsi di wilayah Kabupaten ditetapkan di Pelabuhan Internasional Teluk Buton sebagai simpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasar global.

Pada kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yakni:

- a. kawasan perkotaan Ranai berada di Kecamatan Bunguran Timur;
- b. kawasan pariwisata alam berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- c. kawasan minapolitan Serantas berada di Kecamatan Pulau Tiga;
- d. kawasan agropolitan Kelarik berada di Kecamatan Bunguran Utara; dan
- e. kawasan agropolitan Batubi berada di Kecamatan Bunguran Barat.



Sedangkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung Gunung Ranai;
- b. kawasan hutan lindung Gunung Bedung;
- c. kawasan hutan lindung Gunung Sekunyam; dan
- d. kawasan cagar alam dan suaka alam laut binaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.

3.5.2 Perencanaan Perubahan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011 -2031

Upaya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 merupakan bentuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pasca evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperbaharui berbagai kebijakan sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi saat ini dan perkiraan pada masa mendatang. Salah satu poin penting perubahan adalah tujuan penataan ruang wilayah dengan adanya penambahan sektor pembangunan dalam upaya perwujudan ruang Natuna sehingga menjadi "Mewujudkan ruang Kabupaten Natuna sebagai gerbang utara NKRI yang mandiri, berdaya saing dalam keseimbangan lingkungan hidup berbasis agrominawisata, migas, industri, serta pertahanan dan keamanan".

Strategi Penataan Ruang wilayah yang ditetapkan dalam Perubahan RTRW Kabupaten Natuna meliputi:

- 1) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata tanpa mengesampingkan kondisi lingkungan di seluruh wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya meliputi:
 - a. menetapkan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan kawasan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan wilayah; dan
 - b. menentukan hierarki pusat pelayanan berdasarkan aspek perekonomian pulau-pulau kecil, konservasi alam, dan kependudukan.



- 2) Strategi pengembangan sistem jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, lingkungan permukiman, yang terintegrasi dengan mempertahankan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menghubungkan antarpusat kawasan melalui sistem jaringan transportasi antarmoda yang terintegrasi;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana energi serta menciptakan energi alternatif terbarukan yang efisien dan ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau seluruh wilayah;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana air baku dan air bersih untuk mewujudkan ketersediaan air bersih;
 - e. meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur pemanfaatan sumber daya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - f. mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah, penyediaan sistem pengolahan air limbah yang komprehensif, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah beracun dan berbahaya;
 - g. mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di perkotaan dan pulau-pulau kecil berpenghuni; dan
 - h. mengembangkan sarana dan prasarana jaringan evakuasi bencana.
- 3) Strategi pemanfaatan kawasan lindung yang efisien, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah kepulauan meliputi:
 - a. melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan resapan air, rawa, ruang sempadan, dan daerah rawan bencana; dan
 - b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 4) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi



perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah meliputi:

- a. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan;
- b. mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
- c. melestarikan situs warisan budaya (peninggalan budaya) dan lindung geologi;
- d. pengalokasian ruang bagi kegiatan budidaya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan lindung; dan
- e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.

5) Strategi pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor pertambangan, sumber daya bahari, pertanian, dan pariwisata meliputi:

- a. memanfaatkan kawasan hutan produksi untuk perkebunan masyarakat;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kawasan pertanian, perkebunan, dan pertambangan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat;
- d. mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor perikanan;
- e. mengembangkan industri pariwisata dan pertambangan yang mendorong peningkatan investasi kawasan, usaha kecil menengah, dan penciptaan lapangan kerja;
- f. mengembangkan destinasi atau daya tarik pariwisata yang diikuti dengan peningkatan iklim usaha serta pemasaran pariwisata; dan
- g. menjaga kondisi lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.



- 6) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. mengembangkan dan mensinergikan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya di sekitarnya secara selektif; dan
 - b. melestarikan dan menjaga garis pantai pulau-pulau terluar.
- 7) Strategi percepatan perwujudan kawasan strategis sudut pandang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup meliputi:
 - a. memanfaatkan sumber daya alam migas dan bahari sebagai sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri dalam mendukung industri minyak dan gas maupun industri lainnya; dan
 - c. mengembangkan kawasan agrominawisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pada kawasan strategis kabupaten, meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yakni:

- a. Kawasan agropolitan Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;
- b. Kawasan agropolitan Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi; dan
- c. Kawasan agropolitan Payak di Kecamatan Serasan Timur.

4.2.3.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Natuna

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki berbagai ekosistem lingkungan hidup, maka Kabupaten Natuna harus merumuskan KLHS secara terstruktur dan memiliki integrasi dengan berbagai perencanaan pembangunan Natuna.



Seperti disebutkan dalam Pasal 16 UU 32/2009, dokumen KLHS ditujukan untuk memuat kajian antara lain:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

3.6 ISU STRATEGIS KABUPATEN NATUNA

Dalam perumusan isu strategis Kabupaten Natuna dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah periode pembangunan 2021-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Natuna yang telah diinventarisasi permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Natuna, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna periode pembangunan 2021-2026 dapat dilihat pada hubungan antara permasalahan pembangunan dan isu strategis sebagai berikut.

Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

Misi RPJPD	Arah Kebijakan Tahap IV	Permasalahan	Isu Strategis
Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing	Pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan potensi unggulan sumber daya alam	Belum optimalnya penataan destinasi wisata beserta infrastruktur penunjangnya	Kemandirian ekonomi berbasis masyarakat, terutama di sektor kemaritiman dan pariwisata
		Belum optimalnya investasi di Natuna	



		Kualitas produk unggulan daerah yang belum mampu bersaing dengan produk daerah lain	
		Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi angkutan barang antar pulau	
	Peningkatan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani	Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat	
		Keterbatasan pelaku usaha industri dalam pemahaman dan penggunaan teknologi	
		Kualitas dan Kemampuan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Hasil Perikanan	

Keselarasan Antar Kebijakan RTRW Kabupaten Natuna 2021-2041 Dengan Misi RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026

No.	Kebijakan RTRW Kabupaten Natuna	Penjabaran Dalam RPJMD Kabupaten
-----	---------------------------------	----------------------------------



	2021-2041	Natuna 2021-2026
1.	Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata tanpa mengesampingkan kondisi lingkungan di seluruh wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya	Diterjemahkan dalam Misi ke 2, kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
2.	Pemanfaatan kawasan lindung yang efisien, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah kepulauan	Diterjemahkan dalam Misi ke 2, kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
3.	pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor pertambangan, sumber daya bahari, pertanian, dan pariwisata	Diterjemahkan dalam Misi ke 2, kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
4.	percepatan perwujudan kawasan strategis sudut pandang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup	Diterjemahkan dalam Misi ke 2, kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal



IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mengembangkan peluang dan inovasi baru serta mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna sebagai organisasi yang membantu Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai perencana penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, perlu perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna harus mengacu pada visi Bupati Kabupaten Natuna sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Pertanian Kabupaten Natuna akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sasaran strategis/tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis, dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan;
3. Meningkatkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang Bersih dan Akuntabel;
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima.

Keterkaitan dokumen antara yang satu dengan lainnya penting untuk mengukur sejauhmana kesesuaian perencanaan dimulai dari penetapan visi pembangunan 5 tahun (RPJMD) hingga penyusunan program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, perlu usaha untuk memperkuat struktur kelembagaan dan mekanisme perencanaan



pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal 2020 / 2021	Target				
						2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan	LPE sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	-2,38	2,24	3,71	3,81	3,91	4,01

Koordinasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparatur pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan untuk lebih mendayagunakan potensi daerah serta untuk makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu adanya peran aktif masyarakat sebagai pengawas dan koordinator pembangunan. Berdasarkan **TUJUAN** tersebut maka **SASARAN** yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatkan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri;
- Meningkatkan Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan;
- Meningkatkan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

Hubungan antara tujuan, dan sasaran; beserta target-targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan indikator Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2021)
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	30,29 %	33,89 %	33,97 %	34,05 %	34,13 %	34,21 %	34,21 %
	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan	Produksi Sektor Pertanian	129.266	135.729	142.516	149.641	157.123	164.980	164.980
Meningkatkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai Lakip	71,42	76,00	79,50	80,00	80,50	81,00	81,00
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	3,46	3,46	3,47	3,48	3,49	3,50	3,50



V.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Penentuan strategi pembangunan pertanian Kabupaten Natuna di rumuskan berdasarkan misi yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Natuna 2021 -2026 yaitu 'Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis Potensi Lokal'.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pencapaian tujuan dan sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, perlu di rumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut di jadikan sebagai pedoman dalam menentukan program prioritas yang akan di jabarkan setiap tahunnya untuk lima tahun yang akan datang.



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN NATUNA BERDASARKAN MISI DAN STRATEGI MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman, Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Budaya		
MISI II	:	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal		
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan		Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan	Pengembangan dan Penguatan potensi Pertanian dan Perikanan	1. Akselerasi Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi dalam Rangka Mewujudkan Natuna yang Unggul 1.1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan 2. Peningkatan Daya Saing Daerah melalui penguatan Infrastruktur dan Percepatan Peningkatan Ekonomi 2.1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Natuna 2021-2026 Tahunan

No.	Misi/Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
MISI 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal							
	Pengembangan dan Penguatan potensi Pertanian dan Perikanan	Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan					



Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman / petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- Peningkatan mutu genetik tanaman dan ternak;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pertanian.



VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis Kepala Daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung di dedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah di dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 di dukung dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati. Program unggulan di prioritaskan lima tahun ke depan. Jenis program unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

KETERKAITAN MISI, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026

2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL					
Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pertanian dan Perikanan	Pengembangan dan Penguatan Potensi Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Intervensi CPM	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	revalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang digunakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Prasarana Pertanian Yang di Gunakan	Dinas Ketahanan Pangan



			PRASARANA PERTANIAN		dan Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan angka kesakitan ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			05. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Jumlah Lahan yang dikendalikan/ditanggulangi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			07. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan lokalitas SKPD, program/kegiatan lintas SKPD dan program/kegiatan kewilayahan. Program/kegiatan lokalitas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, program lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD, sedangkan program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar kementerian/lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun untuk rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna 2016 –2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :





Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022-2026

* dalam ribuan rupiah

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggung jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE INTERVENSI CPM	11.43	5	100	5	100	5	100	5	50	5	50	36.43	400	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	66,67	73,33	100	80	100	86,67	100	93,33	50	100	50	100	400	
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	10	11	100	12	100	13	100	14	50	15	50	15	400	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE) KETERSEDIAAN	2754	2400	275	2400	280	2400	280	2400	280	2400	280	2400	1,395,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	CV Ratio	CV<=10%	CV<=10%	265	CV<=10%	270	CV<=10%	270	CV<=10%	270	CV<=10%	270	CV<=10%	1,345,000	
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	0	1	50	1	55	1	55	1	55	1	55	5	270	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	0	1	90	1	90	1	90	1	90	1	90	5	450	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	6	500	
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	0	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	5	75	



Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10	10	50	
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Regulasi	0	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	0	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	20	50	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE) KONSUMSI	2754	2100	120	2100	140	2100	175	2100	190	2100	230	2100	855	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	69.9	57 gr/kap/hr	120	57 gr/kap/hr	140	57 gr/kap/hr	175	57 gr/kap/hr	190	57 gr/kap/hr	230	57	855	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5	1	25	1	25	1	30	1	35	1	45	10	160	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	32	5	70	6	90	7	120	8	130	9	160	9	570	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	0	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PREVALENCE PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT	5.12	4.6	250	4.08	395	3.55	420	3.03	455	2.51	565	2.51	2,085,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	1	10	1	10	1	10	1	30	1	30	5	90	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	1	10	1	10	1	10	1	30	1	30	5	90	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	37.16	10	240	10	385	10	410	10	425	10	535	10	1,995,000	



Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	61	12	100	12	135	12	150	12	175	12	185	12	745	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.56	16	140	20	250	25	260	30	250	35	350	141.56	1,250,000	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG AMAN	90	90	310	90	330	90	350	90	370	95	385	95	1,745,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi	60	60	310	60	330	60	350	60	370	60	385	60	1,745,000	
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	0	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	5	350	
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	5	300	
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	1	50	1	60	1	70	1	80	1	90	5	350	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	1	60	1	70	1	80	1	90	1	95	5	395	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	5	350	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0,52	1	100	1,25	100	1,5	200	1,75	200	2	200	7,5	800	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas tanaman pangan/hortikultura yang dimanfaatkan	1,53	1,53	100	1,53	100	1,53	200	1,53	200	1,53	200	7,65	800	
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	10	100	10	100	10	200	10	200	10	200	50	800	



PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	1,311	1,5	235,315	1,5	215	1,5	225	1,5	235	1,5	345	7,5	1,255,315	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lahan kebun induk yang dimanfaatkan	41,43	41,43	75	41,43	75	41,43	75	41,43	75	41,43	75	41,43	375	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	0	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	5	375	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lahan Tanaman Pertanian/Perkebunan yang Dimanfaatkan	1,53	1,53	160,315	1,53	140	1,53	150	1,53	160	1,53	270	7,65	880,315	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0	5	160,315	5	140	5	150	5	160	5	270	25	880,315	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI TERNAK	2,94	0,75	400	0,75	500	0,75	500	0,75	500	0,75	500	3,5	2,400,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kenaikan populasi ternak	1,48	1,48	300	1,48	400	1,48	400	1,48	400	1,48	400	7,4	1,900,000	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0	30	300	30	400	30	400	30	400	30	400	150	1,900,000	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase lahan hijauan pakan ternak yang dikelola	0	3,3	100	3,3	100	3,3	100	3,3	100	3,3	100	16,65	500	
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	50	500	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE SARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	57,87	60,76	250	63,8	250	66,99	250	70,34	250	73,86	250	73,86	1,250,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	219	5	250	5	250	5	250	5	250	5	250	244	1,250,000	



Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	5	750	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	39	40	1,000,000	41	820	42	820	43	820	44	820	44	4,280,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B	12.812	2.562,40	600	2.562,40	420	2.562,40	420	2.562,40	420	2.562,40	420	12.812	2,280,000	
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	0	1	320	1	320	1	320	1	320	1	320	1	1,600,000	
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0	1	280	1	100	1	100	1	100	1	100	1	680	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan perkebunan	43.323	8.664,50	100	8.664,50	100	8.664,50	100	8.664,50	100	8.664,50	100	43.323	500	
Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	500	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi dan atau Jalan Usaha Tani	3	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	20	500	



Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	0,52	0,5	350	0,48	350	0,45	350	0,43	350	0,4	350	0,4	1,750,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	14,7	15	350	15	350	15	350	15	350	15	350	15	1,750,000	
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0	1	350	1	350	1	350	1	350	1	350	5	1,750,000	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE LAHAN YANG DIKENDALIKAN/DITANGGULANGI	5.0	6.0	220	6.5	220	7.0	220	7.5	320	8.0	320	8.0	1,300,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40	40	220	40	220	40	220	40	320	40	320	200	1,300,000	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0	40	220	40	220	40	220	40	320	40	320	200	1,300,000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DAN KELEMBAGAAN PETANI	2.0	2.0	292,266	2.0	292,266	2.0	292,266	2.0	342,266	2.0	442,266	2.0	1,661,330	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Penyuluh Yang Mempunyai Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	0	20	125	20	125	20	125	20	175	20	275	100	825	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	1	125	1	125	1	125	1	175	1	275	5	825	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Dibina	26,59	27,92	20	29,25	20	30,58	20	31,91	20	33,24	20	33,24	100	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase poktan yang mengikuti sekolah lapang	0	1,3	147,266	1,3	147,266	1,3	147,266	1,3	147,266	1,3	147,266	6,5	736,33	



Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5	5	147,266	5	147,266	5	147,266	5	147,266	5	147,266	25	736,33	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA BPP YANG DIADAKAN/DIBANGUN	33,33	6,66	143	6,66	113	6,66	113	6,66	113	6,66	113	33,33	595	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana BPP	33,33	20	143	20	113	20	113	20	113	20	113	100	595	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1	1	143	1	113	1	113	1	113	1	113	1	595	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	80	80	13,350,157	85	13,960,472	85	14,260,472	90	14,510,472	90	14,960,472	90	71,042,044	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	9,981,978	1	10,434,211	1	10,697,293	1	10,947,293	1	11,397,293	1	53,458,069	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	83	9,981,978	83	10,434,211	83	10,697,293	83	10,947,293	83	11,397,293	83	53,458,069	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95	141	95	141	95	141	95	141	95	141	95	705	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	1	36	1	36	1	36	1	36	1	36	5	180	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	3	60	3	60	3	60	3	60	3	60	15	300	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	3	45	3	45	3	45	3	45	3	45	15	225	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	0	70	1,411,550	70	1,606,550	75	1,606,550	75	1,606,550	80	1,606,550	80	7,837,749	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	212,15	1	212,15	1	212,15	1	212,15	1	212,15	5	1,060,749	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	124,4	1	124,4	1	124,4	1	124,4	1	124,4	5	622	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	20	12	20	12	20	12	20	12	20	12	100	



Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	360	1	500	1	500	1	500	1	500	5	2,360,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	545	12	600	12	600	12	600	12	600	12	2,945,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	5	5	60	5	60	5	60	5	60	5	60	25	300	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	60	5	60	5	60	5	60	5	60	25	300	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	0	65	390	65	390	70	390	70	390	75	390	75	1,950,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	5	1,500,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	2	90	2	90	2	90	2	90	2	90	10	450	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	80	950,629	80	950,629	85	950,629	85	950,629	90	950,629	90	4,753,143	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1	36	1	36	1	36	1	36	1	36	5	180	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	26	2	26	2	26	2	26	2	26	10	130	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1	888,629	1	888,629	1	888,629	1	888,629	1	888,629	5	4,443,143	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	0	65	50	65	50	70	50	70	50	75	50	75	250	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	50	5	50	5	50	5	50	5	50	25	250	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	80	365	80	328,083	80	365	80	365	80	365	80	1,788,083	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	200	7	200	7	200	7	200	7	200	7	1,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	145	1	108,083	1	145	1	145	1	145	5	688,083	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100	



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	71.42	76	64,389	79.50	64,389	80	64,389	80.50	64,389	81	64,389	81	321,943	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	72	64,389	74	64,389	76	64,389	78	64,389	80	64,389	80	321,943	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	64,389	2	64,389	2	64,389	2	64,389	2	64,389	2	321,943	
				17,460,1 26		18,130,1 26		18,620,1 26		19,050,1 26		19,875,1 26		93,135,6 32	



VII.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam fokus layanan urusan penunjang dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Natuna yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

NO	Bidang Urusan / Indikator	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD 2020	TARGET						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1.	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	Persen	30,29	30,29	33,89	33,97	34,05	34,13	34,21	34,21
2.	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan	Kkal/kap/hr	2.269	2.269	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



	yang Beragam dan Bergizi Seimbang									
3.	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Sample	60	60	60	60	68	68	68	68
4.	Terselurnya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	Ton	15,56	15,56	16	16	16	16	16	16
5.	Terselurnya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	CV Rasio	CV=10%	CV=10%	CV=10%	CV=10%	CV=10%	CV=10%	CV=10%	CV=10%
6.	Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	LPM	10	10	1	1	1	1	1	15
7.	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	Regulasi	0	0	1	1	1	1	1	5
9.	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Jiwa	835	835	835	835	835	835	835	835
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1.	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana	Persen	53,3	53,3	55	60	70	80	90	90
2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2	2
3.	Persentase Prasarana yang digunakan	Persen	76,9	76,9	71	72	73	74	75	75
4.	Prasarana Pertanian yang digunakan	Unit	39	39	39	40	41	42	43	43
5.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	129.265	129.265	135.729	142.516	149.641	157.123	164.980	164.980
6.	Produktivitas Pertanian Per Hektar per Tahun	Persen	5,11	5,11	5,37	5,63	5,92	6,21	6,52	6,52
7.	Sarana Pertanian yang diberikan	Unit	0	0	5	5	5	5	5	5

VIII.

PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna 2021-2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna untuk 5 (Lima) tahun mendatang dan mengacu RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna tahun anggaran 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan menjadi dokumen perencanaan tahunan. Pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Ranai, Januari 2022

Kepala Dinas



SRI HARININGSIH, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700124 199703 2 004



